

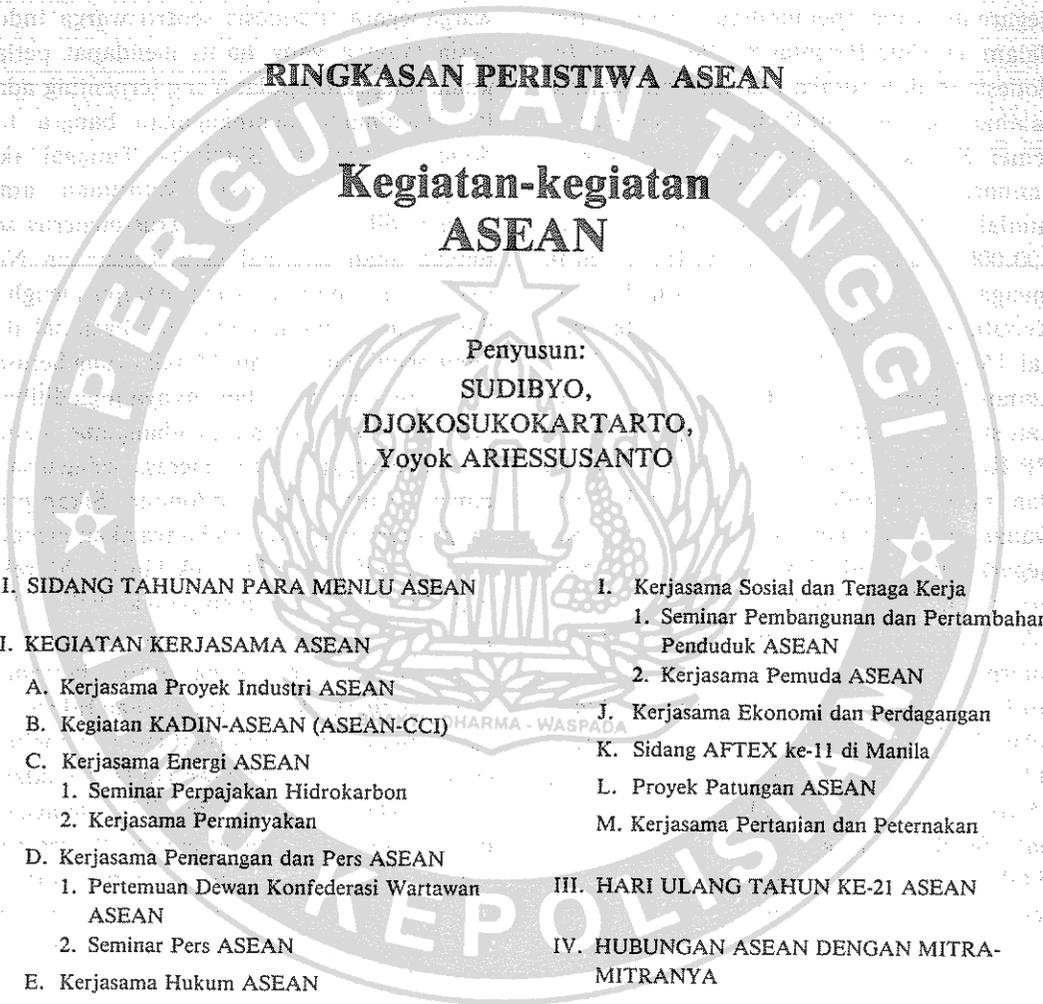
5

## Dokumen

### RINGKASAN PERISTIWA ASEAN

## Kegiatan-kegiatan ASEAN

Penyusun:  
SUDIBYO,  
DJOKOSUKOKARTARTO,  
Yoyok ARIESSUSANTO

- 
- I. SIDANG TAHUNAN PARA MENLU ASEAN
  - II. KEGIATAN KERJASAMA ASEAN
    - A. Kerjasama Proyek Industri ASEAN
    - B. Kegiatan KADIN-ASEAN (ASEAN-CCI)
    - C. Kerjasama Energi ASEAN
      - 1. Seminar Perpajakan Hidrokarbon
      - 2. Kerjasama Perminyakan
    - D. Kerjasama Penerangan dan Pers ASEAN
      - 1. Pertemuan Dewan Konfederasi Wartawan ASEAN
      - 2. Seminar Pers ASEAN
    - E. Kerjasama Hukum ASEAN
    - F. Kerjasama Metereologi ASEAN
    - G. Kerjasama Pariwisata
      - 1. Forum Pariwisata ASEAN
      - 2. Taman Mini ASEAN
      - 3. Organisasi Kebun Binatang ASEAN
    - H. Kerjasama Kesehatan
      - 1. Palang Merah ASEAN
      - 2. Pertemuan Pengobat Tradisional ASEAN
    - I. Kerjasama Sosial dan Tenaga Kerja
      - 1. Seminar Pembangunan dan Pertambahan Penduduk ASEAN
      - 2. Kerjasama Pemuda ASEAN
    - J. Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan
    - K. Sidang AFTEX ke-11 di Manila
    - L. Proyek Patungan ASEAN
    - M. Kerjasama Pertanian dan Peternakan
  - III. HARI ULANG TAHUN KE-21 ASEAN
  - IV. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA-MITRANYA
    - A. Pertemuan ASEAN dengan Mitra Dialognya
    - B. Hubungan ASEAN-Australia
    - C. Hubungan ASEAN-Jepang
    - D. Hubungan ASEAN dengan Masyarakat Eropa
  - V. PERTEMUAN INFORMAL JAKARTA
    - A. Persiapan-persiapan
    - B. Persidangan-persidangan
    - C. Hasil Pertemuan

## I. SIDANG TAHUNAN PARA MENLU ASEAN

Sidang Para Menlu ASEAN ke-21 berlangsung di Bangkok tanggal 4-5 Juli 1988, dihadiri oleh Menlu Indonesia, Ali Alatas, Menlu Filipina, Raul Manglapus, Menlu Muangthai, Siddhi Savetsila, Menlu Singapura, Suppiah Dhanabalan, Menlu Malaysia, Dato Abu Hassan Omar dan Menlu Brunei Darussalam, Mohammad Bolkih, untuk membahas antara lain cara-cara membantu mengakhiri konflik Kamboja, pengungsi Vietnam dan gagasan AS mengenai pembentukan Mini Marshall untuk membantu keuangan Filipina (*Antara*, 4 Juli 1988).

Sebelum sidang itu dimulai, dilangsungkan pertemuan-pertemuan untuk mempersiapkannya, seperti Pertemuan Para Pejabat Senior ASEAN di Bangkok tanggal 31 Juni 1988, Pertemuan Panitia Tetap ASEAN di Bangkok tanggal 1 Juli dan Pertemuan Tidak Resmi Para Menlu ASEAN di Bangkok juga tanggal 3 Juli 1988.

Pertemuan para Pejabat Senior ASEAN membahas program bantuan untuk membangun perekonomian Filipina, pengungsi Vietnam dan Pertemuan Informal Jakarta atau Jakarta Informal Meeting (JIM) (*Antara*, 2 Juli 1988). Pertemuan Panitia Tetap ASEAN membahas kemajuan kerjasama berbagai kepanitiaan yang berada dalam tanggung jawabnya, program kegiatan dan jadwal pertemuan ASEAN dengan mitra dialognya. Pertemuan ini menyetujui pedoman keikutsertaan pihak swasta dalam setiap pertemuan ASEAN ataupun antara ASEAN dan mitra dialognya, serta menandatangani pernyataan tentang kemajuan peranan wanita ASEAN di berbagai bidang kehidupan (*Antara*, 2 Juli 1988). Sementara, dalam pertemuan tidak resminya itu, para Menlu ASEAN menyatakan bahwa ASEAN mendukung rencana penyelenggaraan JIM, dan menyambut baik keinginan Vietnam dan kelompok-kelompok perlawanan Kamboja untuk menghadiri JIM (*Antara*, 4 Juli 1988).

PM Muangthai, Prem Tinsulanonda, mengatakan pada sidang pembukaan bahwa: (1) dukungan Uni Soviet untuk membantu menyelesaikan konflik Kamboja secara damai pantas dihargai; (2) konflik Kamboja telah mengakibatkan negara-negara Asia Tenggara kehilangan waktu 10 tahun yang seharusnya dapat untuk membangun perekonomian dan politiknya (*Pelita*, 5 Juli 1988); (3) usul Pangeran Norodom Sihanouk mengenai pembentukan Pasukan Pemelihara Perdamaian

di Kamboja agar diperhatikan; (4) keikutsertaan Sekjen PBB untuk membantu menyelesaikan konflik Kamboja merupakan usaha agar perdamaian di Kamboja dapat ditegakkan dan dipelihara; (5) negara-negara yang terlibat dalam penyelesaian konflik Kamboja menginginkan penarikan pasukan asing, rekonsiliasi nasional dan pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri rakyat Kamboja menuju terbentuknya negara yang merdeka, netral dan non-blok serta tidak merupakan ancaman bagi negara tetangganya (*Antara*, 5 Juli 1988).

Menlu Siddhi Savetsila mengatakan pada kesempatan itu pula bahwa: (1) JIM memberi harapan untuk menyelesaikan konflik Kamboja; (2) dia menghargai prakarsa Indonesia untuk menyelesaikan konflik Kamboja (*Kompas*, 5 Juli 1988); (3) ASEAN harus segera melaksanakan keputusan KTT ASEAN III untuk meningkatkan perdagangan antar regional (*Antara*, 5 Juli 1988).

Menlu Ali Alatas mengemukakan pada acara yang sama bahwa: (1) negara anggota ASEAN agar bersikap tegas untuk mengusahakan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas nuklir; (2) terciptanya kawasan Asia Tenggara yang bebas nuklir merupakan sumbangan penting dalam proses pembatasan persenjataan nuklir (*Antara*, 4 Juli 1988); (3) ASEAN harus secara bertahap menghapus hambatan perdagangan dan investasi antar ASEAN; (4) ASEAN agar meningkatkan partisipasi pihak swasta dan memperluas usaha-usaha patungan dengan penanaman modal asing (*Antara*, 5 Juli 1988).

Menlu Dato Abu Hassan Omar mengemukakan perlunya ASEAN bekerja keras untuk meningkatkan perdagangan antar regional. Selanjutnya Menlu Malaysia itu mengatakan bahwa: (1) ASEAN prihatin atas usaha negara-negara industri yang memulihkan ekonomi domestiknya melalui proteksionisme; (2) negara-negara industri agar memberi kesempatan bagi masuknya produk-produk ekspor ASEAN dengan menghapus hambatan tarif dan non-tarif serta praktek perdagangan yang tidak adil (*Antara*, 5 Juli 1988).

Menlu Mohammad Bolkih mengatakan bahwa Sekretariat ASEAN di Jakarta perlu diperkuat agar dapat melaksanakan keputusan-keputusan KTT ASEAN III dan menyediakan informasi ekonomi (*Antara*, 5 Juli 1988).

Menlu Raul Manglapus mengemukakan bahwa: (1) penyelesaian konflik Kampuchea diharapkan dapat mendorong AS mewujudkan gagasan tentang kawasan

damai; (2) kini merupakan saat yang tepat untuk menghapuskan semua hambatan hubungan ekonomi internasional; (3) negaranya berusaha keras untuk mengatasi hutangnya (*Antara*, 5 Juli 1988).

Menlu Suppiah Dhanabalan mengatakan bahwa pengembangan pola preferensi perdagangan mengalami kemajuan dan telah mengurangi hambatan-hambatan non-tarif (*Antara*, 5 Juli 1988).

Sidang Para Menlu ASEAN itu diakhiri dengan penandatanganan deklarasi tentang Kemajuan Peranan Wanita ASEAN (Development on the Advancement of Women in the ASEAN Region), dan tiga Memorandum of Understanding, mengenai Program Kerjasama ASEAN-Australia, Program Pasca Panen Biji-bijian ASEAN-Kanada dan Pertukaran Data ASEAN dengan AS (*Automated Data Exchange*) (*Antara*, 5 Juli 1988).

Komunike bersama tanggal 5 Juli 1988 mengatakan antara lain bahwa para Menlu ASEAN: (1) menegaskan kembali dukungannya atas rencana bantuan multilateral untuk membangun ekonomi Filipina; (2) menghendaki agar negara-negara industri mendukung program bantuan ASEAN itu; (3) menyetujui dukungan negara-negara industri untuk menghapuskan proteksionisme, meningkatkan bantuan keuangan dan menerapkan kebijaksanaan anggaran dan moneter yang tepat untuk mengatasi beban hutang Dunia Ketiga; (4) menyetujui usaha-usaha negara-negara industri untuk menstabilkan nilai tukar mata uang dunia (*Antara*, 5 Juli 1988); (5) mendesak para Menteri Ekonomi ASEAN agar memberi peranan yang lebih besar kepada pihak swasta dalam Pertemuan Para Menteri Ekonomi ASEAN (*Suara Pembaruan*, 5 Juli 1988); (6) prihatin atas masih berlangsungnya pendudukan Vietnam di Kamboja. Tindakan Vietnam itu bertentangan dengan Piagam PBB dan Hukum Internasional serta merintangi tercapainya perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara; (7) menyetujui penyelesaian politik secara menyeluruh atas konflik Kamboja melalui penarikan pasukan Vietnam dan pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri rakyat Kamboja di bawah pengawasan internasional; (8) prihatin atas mengalirnya arus pengungsi ke negara-negara ASEAN. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas kawasan Asia Tenggara; (9) menyetujui usaha pencegahan arus pengungsi. Mereka mengusulkan agar: (a) Vietnam bekerjasama dengan masyarakat internasional mengatur *Orderly Departure Programme* (ODP) dan harus bersedia menerima kembali pengungsi Vietnam; (b) Laos mempercepat proses pengembalian para pengungsi yang diatur UNHCR, dan bersedia

menerima mereka kembali dengan spontan dan selamat (*Kompas*, 6 Juli 1988); (10) mendesak masyarakat internasional agar tidak memberi bantuan ekonomi kepada Vietnam selama pasukannya belum ditarik dari Kamboja (*Antara*, 6 Juli 1988); (11) mendesak Jepang agar lebih banyak memasarkan produk-produk ASEAN, terutama barang-barang manufaktur dan semi konduktor; (12) menegaskan kembali perlunya Jepang mengusahakan cara untuk meringankan beban hutang negara-negara ASEAN sebagai akibat naiknya Yen; (13) menyetujui pencalonan Malaysia sebagai anggota DK-PBB periode 1989-1990; (14) menyetujui usul untuk menetapkan tahun 1992 sebagai Tahun Kunjungan ASEAN (*Kompas*, 6 Juli 1988).

## II. KEGIATAN KERJASAMA ASEAN

### A. KERJASAMA PROYEK INDUSTRI ASEAN

Pertemuan Asosiasi Industri Pulp dan Kertas ASEAN atau ASEAN Pulp and Papers Industrial Corporation (APPIC) ke-5 berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 11 Juli 1988, dihadiri oleh 51 peserta dari negara-negara ASEAN.

Deputi Menteri Perdagangan dan Perindustrian Malaysia, Datuk Kok Wee, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) kerjasama ekonomi ASEAN perlu dilakukan untuk mengetahui potensi industri pulp dan kertas di kawasan ASEAN. Hal ini berguna untuk menjamin kelangsungan hidup para produsen pulp dan kertas di tengah kelesuan ekonomi dunia; (2) perkembangan industri pulp dan kertas akan mempercepat pertumbuhan perdagangan antara anggota ASEAN (*Antara*, 12 Mei 1988).

Pertemuan Panitia Ahli Proyek Automotif ASEAN berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 13-14 Juni 1988, dihadiri oleh 33 peserta dari negara-negara ASEAN, kecuali Indonesia, untuk menyusun rancangan memorandum tentang proyek automotif yang akan disampaikan kepada Komisi Industri, Pertambangan dan Energi ASEAN. Rancangan memorandum itu meliputi usaha Mitsubishi Motor Corporation (MMC) dan perusahaan-perusahaan patungan ASEAN untuk memproduksi 100 komponen kendaraan tertentu yang dapat ditukar dengan komponen lain dari negara-negara ASEAN (*Antara*, 15 Juni 1988).

## B. KEGIATAN KADIN-ASEAN (ASEAN-CCI)

Ketua Eksekutif Panitia Kerja Kelompok 14 (K-14), Paul Leong, mengatakan di Kuala Lumpur tanggal 13 Mei 1988 bahwa Panitia Kerja Kelompok 14 yang dibentuk oleh KADIN-ASEAN tanggal 26 November 1987 akan diubah menjadi sekretariat teknis untuk memperjuangkan masa depan ekonomi ASEAN (*Suara Karya*, 13 Mei 1988).

Seorang anggota Panitia Kelompok 14, Datuk Muhammad Ramli Kushairi mengatakan di Kuala Lumpur tanggal 16 Juli 1988 bahwa AFC perlu dikaji kembali: (1) karena gagal membiayai pembangunan AIJV; (2) agar tugas utama AFC untuk membiayai AIJV yang ditetapkan enam tahun lalu dapat normal kembali (*Antara*, 17 Juli 1988).

Pertemuan KADIN-ASEAN berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 18-23 Juli 1988 untuk membahas fungsi dan kegiatan Badan Usaha Keuangan ASEAN atau ASEAN Finances Corporation (AFC), serta penanaman modal untuk proyek AIJV (ASEAN Industrial Joint Ventures).

Ketua Kelompok Kerja Bidang Industri Patungan ASEAN Dr. Sunarto Brawerosuyanto mengatakan pada pertemuan tanggal 18 Juli 1988 bahwa: (1) KADIN-ASEAN menyetujui 16 proyek perindustrian usaha patungan ASEAN dengan biaya US\$80 juta yang pelaksanaannya sedang dikaji; (2) proyek patungan itu meliputi produksi komponen sepeda motor, mobil, mesin listrik, pemrosesan daging, bahan kimia dan kertas berharga; (3) KADIN-ASEAN juga sedang meneliti 110 jenis produk berpotensi sebagai pengganti barang impor (*Antara*, 19 Juli 1988).

Ketua KADIN Indonesia selaku Ketua Delegasi Indonesia, Sukamdani S. Gitosardjono, mengatakan pada pertemuan tanggal 19 Juli 1988 bahwa: (1) Indonesia mengusulkan perdagangan bilateral antar negara anggota ASEAN, untuk mendorong kerjasama investasi dan teknologi; (2) usul Indonesia itu merupakan salah satu usaha nyata dari kesepakatan bersama untuk meningkatkan kerjasama ekonomi ASEAN (*Antara*, 20 Juli 1988).

Sekjen KADIN-ASEAN Jose Luis Yulo Jr. mengatakan pada pertemuan tanggal 20 Juli 1988 bahwa: (1) sejak 1 Juli 1988 negara-negara ASEAN menerapkan sistem harmoni, suatu sistem bea cukai terbaru untuk memudahkan dan menyeragamkan pengaturan perda-

ngan di kawasan ASEAN; (2) Malaysia merupakan negara pertama yang melaksanakan sistem itu dalam penyusunan dan pengelompokan barang dengan kode baru (*Antara*, 21 Juli 1988). Direktur Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Malaysia, Harun Siraj, mengatakan pada pertemuan tanggal 20 Juli 1988 bahwa: (1) sistem harmoni ini dapat merupakan patokan dasar untuk menentukan jenis barang, harga bea masuk dan segala keperluan bea cukai; (2) Malaysia akan membantu kesulitan negara-negara ASEAN lainnya untuk melaksanakan sistem itu; (3) pelaksanaan sistem itu jangan sampai mengganggu kepentingan para pengusaha (*Antara*, 21 Juli 1988).

## C. KERJASAMA ENERGI ASEAN

### 1. Seminar Perpajakan Hidrokarbon

Seminar Perpajakan Hidrokarbon dan Kaitannya dengan Pengembangan dan Eksplorasi Minyak Bumi untuk Negara-negara ASEAN berlangsung di Jakarta tanggal 20-25 Juni 1988 untuk membahas harga, sistem perpajakan dan investasi asing dalam bidang minyak bumi.

Dirjen Pajak Salamun A.T., mengatakan pada penutupan seminar itu bahwa: (1) ASEAN agar membentuk futures market (perdagangan dengan penyerahan kemudian) untuk menciptakan harga minyak yang lebih stabil di kawasan Asia Tenggara yang dipusatkan di Singapura; (2) fluktuasi harga minyak dunia sangat menyulitkan perkiraan kepastian harga minyak; (3) ASEAN sedang mempelajari usul futures market itu (*Suara Karya*, 27 Juni 1988).

Koordinator ESCAP, Filino Harahap mengatakan pada acara yang sama bahwa: (1) ASEAN mempunyai kemampuan untuk mengekspor 2 juta barrel minyak mentah per hari; (2) penjualan sekitar 50 juta barrel minyak per hari oleh futures market di London dan New York sangat mempengaruhi harga minyak di pasaran dunia (*Suara Karya*, 27 Juni 1988).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Peraturan Perpajakan selaku Ketua Delegasi Indonesia, Drs. Masury, mengatakan bahwa melalui futures market: (a) negara-negara ASEAN dapat mengikuti perkembangan harga minyak yang berkaitan dengan kegiatan investasi hidrokarbon; (2) pemungutan pajak dan investasi hidrokarbon dapat ditingkatkan (*Suara Karya*, 27 Juni 1988).

## 2. Kerjasama Perminyakan

Pertemuan informal Menteri Perminyakan tiga negara ASEAN penghasil minyak berlangsung di Bali tanggal 20 Agustus 1988 untuk membahas: (1) perkembangan harga minyak dunia; (2) hubungan OPEC dan non-OPEC; (3) prospek pasaran di semua kawasan, termasuk Jepang; (4) penciptaan kerjasama dalam konteks ASEAN.

Menteri Pertambangan dan Energi Indonesia, Giannjar Kartasasmita, mengatakan kepada pers di Bali tanggal 20 Agustus 1988 bahwa: (1) Malaysia dan Brunei mendukung penuh keputusan OPEC untuk menciptakan stabilitas harga minyak dunia, dan para anggota OPEC agar mengendalikan diri sehubungan dengan ketentuan produksi yang sudah ditetapkan; (2) Malaysia dan Brunei bersedia menurunkan produksinya untuk menstabilkan harga minyak dunia; (3) semua negara anggota OPEC harus mentaati tingkat produksi; (4) saat ini wadah permanen bagi negara pengekspor minyak ASEAN dirasakan belum perlu; (5) pertemuan informal semacam ini memungkinkan masing-masing pihak berbicara lebih efektif, tulus dan ikhlas; (6) forum ini berfungsi sebagai jembatan antara OPEC dan non-OPEC (*Suara Pembaruan*, 22 Agustus 1988).

Mereka sepakat untuk: (1) mengadakan konsultasi secara periodik; (2) bertemu kembali pada akhir November 1988, dan Indonesia akan melaporkan hasil sidang OPEC. Di samping itu, Malaysia dan Brunei Darussalam menjamin dan mendukung Indonesia untuk terus-menerus memperjuangkan stabilitas harga minyak; (5) meminta semua anggota OPEC untuk menciptakan keutuhan yang lebih kuat agar keputusan yang disepakati mudah dilaksanakan dan dicapai; (6) tidak bersaing memasarkan minyak ke Jepang. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa gencatan senjata antara Iran dan Irak akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan minyak dunia (*Suara Pembaruan*, 22 Agustus 1988).

Wakil Ketua Komisi VI DPR-RI, Budi Hardjono, mengatakan kepada *Antara* di Jakarta tanggal 20 Agustus 1988 bahwa: (1) langkah ketiga negara di bidang perminyakan itu sangat tepat, khususnya untuk menghadapi situasi pasar Jepang; (2) Brunei bisa membantu Indonesia atau OPEC, untuk menciptakan iklim psikologis pasar minyak internasional; (3) untuk memperkokoh kebersamaan dan kekuatan ASEAN perlu dibentuk kerjasama patungan (*Antara*, 21 Agustus 1988).

## D. KERJASAMA PENERANGAN DAN PERS ASEAN

### 1. Pertemuan Dewan Konfederasi Wartawan ASEAN

Pertemuan anggota Dewan Konfederasi Wartawan ASEAN atau Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) ke-8 berlangsung di Jakarta tanggal 15-16 Agustus 1988, diikuti oleh para wakil 5 negara anggota ASEAN serta Jepang sebagai peninjau untuk membahas antara lain: (1) evaluasi kegiatan CAJ; (2) kerjasama CAJ dengan Perhimpunan Penerbit dan Wartawan Surat Kabar Jepang (Nihon Shimbun Kyokai atau NSK).

Sekretaris tetap CAJ, Drs. Djaffar Assegaff melaporkan bahwa: (1) hasil pertemuan ini akan menjadi masukan bagi Pertemuan Menteri Penerangan ASEAN; (2) dalam empat bulan mendatang Indonesia akan menyelenggarakan tiga kegiatan yang melibatkan para wartawan ASEAN, yakni seminar pemberitaan negara-negara ASEAN di media massa Indonesia, seminar sistem media massa di negara-negara ASEAN dan Pertemuan Para Menteri Penerangan ASEAN yang masing-masing akan diselenggarakan pada bulan September, Oktober dan Desember 1988 (*Antara*, 15 Agustus 1988).

Menteri Penerangan Indonesia, Harmoko mengatakan kepada para anggota Dewan Direktur Konfederasi Wartawan ASEAN di Jakarta tanggal 16 Agustus 1988 bahwa: (1) peningkatan kemampuan dan ketrampilan wartawan dapat memperkokoh pers ASEAN; (2) Indonesia akan membantu menyediakan tempat pusat pendidikan dan latihan wartawan ASEAN di Multi Media Training Centre (MMTC) di Yogyakarta.

Pada kesempatan itu, Wakil Presiden CAJ, Ivan Lim melaporkan pula bahwa sidang merumuskan peningkatan kegiatan CAJ, termasuk kegiatan CAJ di forum internasional serta penghimpunan dana dari anggota (*Suara Karya*, 19 Agustus 1988).

Hasil Pertemuan CAJ ke-8 itu antara lain: (1) CAJ menerima usul PWI untuk menyelenggarakan simposium tentang Tata Baru Informasi dan Komunikasi Internasional di Jakarta; (2) simposium akan diselenggarakan bertepatan dengan Hari Pers ASEAN tanggal 11 Maret 1989; (3) CAJ dan NSK sepakat untuk memperluas kerjasama; (4) program tahunan CAJ dan NSK Fellowship yang telah berlangsung 11 tahun akan diteruskan; (5) program tahun depan CAJ dan NSK adalah

kajian masalah urbanisasi. Lima belas wartawan ASEAN, masing-masing 3 dari tiap negara, akan dipilih untuk mengikuti program orientasi selama 40 hari di Jepang atas undangan NSK (*Suara Karya*, 20 Agustus 1988).

Seusai melaporkan hasil pertemuan CAJ kepada Presiden Soeharto di Istana Merdeka tanggal 15 Agustus 1988, Menteri Penerangan Harmoko mengatakan bahwa: (1) Pertemuan Para Senior Bidang Penerangan ASEAN akan berlangsung di Jakarta tanggal 6-7 Desember 1988 untuk membahas perwujudan tata informasi ASEAN, kerjasama tarif dan bidang liputan serta pengembangan kerjasama informasi lainnya; (2) Pertemuan Menteri Penerangan ASEAN akan berlangsung di Jakarta tanggal 8-9 Desember 1988 (*Pelita*, 16 Agustus 1988).

## 2. Seminar Pers ASEAN

Seminar Pers ASEAN yang berlangsung di Jakarta tanggal 23-25 Agustus 1988 dihadiri oleh pejabat-pejabat pemerintah bidang penerangan, para ahli komunikasi dan beberapa redaktur media massa ASEAN serta 70 orang perinjau, untuk membahas sistem pers di negara-negara ASEAN.

Menteri Penerangan Harmoko mengatakan pada pembukaan seminar bahwa: (1) pers di negara-negara ASEAN mengemban misi untuk memperkokoh persatuan dan kesetiakawanan anggota; (2) pers ASEAN harus mampu mendorong terwujudnya Kawasan Damai Bebas dan Netral (ZOPFAN); (3) pers ASEAN mampu meningkatkan ketahanan nasional dan menangkal pemberitaan yang mengganggu stabilitas nasional; (4) membicarakan sistem pers negara-negara ASEAN bukan berarti mencampuri sistem pers masing-masing negara anggota; (5) pers ASEAN dituntut untuk memantapkan fungsinya guna meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat; (6) konsultasi pers ASEAN memberikan kesempatan untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan guna mendalami sistem pers ASEAN (*Jakarta*, 24 Agustus 1988).

Pada kesempatan yang sama, Sekjen ASEAN Mass Communication Research and Information (AMIC), Vijay Menon, mengatakan bahwa: (1) kebebasan pers negara Barat yang menekankan konfrontasi dengan penguasa tidak sesuai lagi dengan nilai-nilai tradisional dan lingkungan ASEAN; (2) salah satu tugas pers

negara berkembang adalah meningkatkan keterpaduan yang sangat diperlukan bagi pembangunan politik dan bangsanya; (3) pers nasional harus mendukung program pembangunan; (4) forum atau seminar ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian yang dapat menghidupkan peranan pers dalam kawasan yang beranekaragam budaya dan politik.

Ketua Dirjen Pers dan Grafika Indonesia, Janner Sinaga, mengatakan: (1) sistem pers Pancasila merupakan sumbangan Indonesia bagi pengembangan sistem pers internasional, khususnya ASEAN; (2) tradisi pers Indonesia adalah pers perjuangan; (3) kebebasan pers yang bertanggungjawab dapat mencegah timbulnya anarki, dan menjamin dinamika pers (*Jakarta*, 24 Agustus 1988).

Wakil Direktur Penerangan dan Komunikasi Singapura, Baskaran Nair, mengatakan: (1) pers harus memisahkan pendapatnya dari pelaporan berita; (2) kadangkala pers harus meliput hal-hal yang berkaitan dengan perdebatan dan perbedaan pendapat; (3) surat kabar bukan tempat wartawan untuk berkampanye tentang isu politik; (4) sistem pers Singapura adalah pemerintah terbuka terhadap pers; (5) pemerintah bisa meminta pers untuk memberitakan sesuatu; (6) pemerintah secara tetap memberikan briefing kepada wartawan utama untuk menjelaskan latar belakang pemikirannya; (7) pemerintah dan wartawan berbagi persepsi dan nilai-nilai secara luas; (8) pemerintah dan redaksi harus berbagi pendapat, idealisme dan tujuan secara luas (*Kompas*, 25 Agustus 1988).

Sementara itu pengajar pada Departemen Komunikasi Universitas Kebangsaan Malaysia, Dr. Syed Arabi Iddid, mengatakan: (1) media massa harus dilihat dari fungsi pembaca, pendengar dan pemirsanya. Semuanya harus aktif menentukan secara tajam pilihan acara yang diinginkan. Mereka harus kritis untuk menilai pilihan isu-isu yang muncul. Mereka juga mempunyai kekuatan tertentu untuk menuntut kualitas penerbitan yang disajikan; (2) sistem pers dapat bekerja secara aktif dalam sistem sosial yang lebih besar; (3) pers bisa dikatakan sebagai hati nurani masyarakat yang harus bisa berfungsi integratif; (4) pers berfungsi pula sebagai pengawas dan transmisi kebudayaan bagi kebaikan masyarakat sendiri (*Kompas*, 25 Agustus 1988).

Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Jakob Oetama mengatakan: (1) pers Indonesia mendukung ideologi dan tujuan nasional; (2) pers sulit untuk menjalankan peranan yang mendukung pembangunan dan tanggung

jawabnya secara keseluruhan; (3) perbedaan pendapat antara pemerintah dan pers harus ditolerir untuk menemukan saling pengertian; (4) dialog pemerintah dan media massa merupakan alat utama yang tepat untuk menyambung pengertian (*Kompas*, 25 Agustus 1988).

Pernyataan bersama antara lain: (1) pers ASEAN seharusnya mempergunakan kebebasan secara produktif; (2) pers ASEAN harus memperhitungkan kelompok-kelompok tertentu yang harus dilayani; (3) pers ASEAN harus membuat kritik yang layak terhadap semua lembaga di dalam masyarakat sebagai bagian dari peranannya dalam pembangunan nasional; (4) pers ASEAN agar mengendalikan diri untuk menghindari salah paham antara kelompok-kelompok yang berbeda agama, ras, dan etnik; (5) media penting sekali diberi kesempatan memperoleh informasi yang sangat diperlukan untuk proses pembangunan; (6) pers nasional ASEAN memikul tanggung jawab yang berat untuk menjalankan kebebasan, karena harus bekerja dalam kerangka kesetiaan terhadap negara (*Merdeka*, 29 Agustus 1988).

#### E. KERJASAMA HUKUM ASEAN

Seminar tentang kerjasama hukum ASEAN untuk memperingati HUT ASEAN ke-21 berlangsung di Sekretariat ASEAN Jakarta tanggal 20 Agustus 1988. Ketua Komite Nasional ASEAN Law Association (ALA), Teuku Muhammad Radhie SH mengatakan bahwa: (1) sebagai organisasi regional, ASEAN perlu mengadakan kerjasama di bidang hukum; (2) berbagai kegiatan kerjasama dalam jangka panjang harus diberi kerangka hukum dan tidak dapat ditetapkan atas dasar policy saja; (3) dewasa ini kesatuan hukum ASEAN sulit diwujudkan karena masih kuatnya paham kedaulatan negara di negara ASEAN; (4) sejak semula ASEAN tidak menghendaki suatu supra organisasi di atas negara anggota; (5) ASEAN perlu mempelajari cara-cara untuk mengatasi perbedaan hukum; (6) di masa mendatang model hukum yang memungkinkan keharmonisan akan banyak digunakan karena tidak menimbulkan masalah kedaulatan (*Suara Pembaruan*, 20 Agustus 1988).

#### F. KERJASAMA METEOROLOGI ASEAN

Pertemuan Sub-Komite Klimatologi ASEAN atau ASEAN Sub-Committee Climatology (ASCC)

berlangsung di Jakarta tanggal 22-24 Agustus 1988 untuk membahas kerjasama klimatologi, geofisika dan meteorologi.

Ketua Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Indonesia, Drs. Sutrisna, mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) untuk mengatasi kebutuhan tenaga ahli dan dana penanganan meteorologi ASEAN, perlu dibentuk pusat meteorologi khusus regional; (2) badan ini menangani ramalan cuaca dan meningkatkan pelayanan meteorologi bagi kebutuhan nasional masing-masing negara (*Kompas*, 24 Agustus 1988).

#### G. KERJASAMA PARIWISATA

##### 1. Forum Pariwisata ASEAN

Direktur Badan Promosi Pariwisata Singapura, Emile Thai, mengatakan kepada komponen pariwisata di Bali tanggal 27 Juli 1988 bahwa forum pariwisata ASEAN yang bertema "Suatu Gabungan Kerjasama Guna Meraih Kemenangan Bersama dalam Pariwisata ASEAN" akan berlangsung di Singapura tanggal 24-29 Januari 1989. Tujuan forum ini antara lain: (1) menjadikan ASEAN sebagai kawasan pariwisata yang terkenal di dunia; (2) meningkatkan daya saing ASEAN sebagai daerah tujuan wisatawan mancanegara di kawasan Asia-Pasifik; (3) mempererat kerjasama antara komponen industri pariwisata ASEAN.

Pada kesempatan itu Kepala Kanwil Deparpostel Drs. Ngurah Ketut mengatakan: (1) ASEAN harus mempererat kerjasama promosi pariwisata untuk menorebo pasaran dunia; (2) komponen pariwisata Indonesia harus berpartisipasi aktif dalam forum itu (*Angkatan Bersenjata*, 29 Juli 1988).

##### 2. Taman Mini ASEAN

Pada tanggal 29 Juli 1988, Menteri Besar Malaka, Rahim Thamby Cik meresmikan pembukaan 7,5 ha areal untuk Proyek Taman Mini di Malaka. Proyek ini direncanakan selesai akhir tahun 1989. Rahim Thamby Cik mengatakan bahwa: (1) proyek ini dibangun untuk meningkatkan pengetahuan wisatawan Malaysia yang ingin berkunjung ke negara-negara ASEAN, serta melengkapi Malaka sebagai daerah tujuan wisata; (2) kecuali Brunei Darussalam, setiap negara ASEAN telah mengirim dua macam bentuk rumah berciri khas negara

masing-masing (*Antara*, 30 Juli 1988).

### 3. Organisasi Kebun Binatang ASEAN

Pertemuan pertama pembentukan Organisasi Kebun Binatang ASEAN, yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Indonesia, Malaysia, Muangthai dan Singapura, berlangsung di Kuala Lumpur tanggal 27-29 Juli 1988 untuk membahas: (1) strategi perkembangan kebun binatang yang dapat membantu program pariwisata; (2) cara-cara perawatan kebun binatang di setiap negara ASEAN; (3) pertukaran informasi dan program pendidikan; (4) latihan petugas kebun binatang dan pertukaran binatang (*Antara*, 14 Juli 1988).

Mereka sepakat untuk: (1) membentuk Asosiasi Kebun Binatang ASEAN; (2) mengadakan pertukaran binatang langka; (3) mengadakan pertemuan berkala dua tahun sekali untuk bertukar pikiran, pandangan dan pengalaman; (4) menjadikan kebun binatang bukan hanya sebagai tempat wisata atau rekreasi tetapi sebagai pusat pendidikan juga; (5) menjadikan kebun binatang sebagai pusat penelitian dan pengembangan hewan langka (*Suara Pembaruan*, 12 Agustus 1988).

## H. KERJASAMA KESEHATAN

### 1. Palang Merah ASEAN

Pertemuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ASEAN berlangsung di Jakarta tanggal 4-5 Agustus 1988 untuk membahas: (1) kegiatan Palang Merah ASEAN di masa mendatang; (2) rekayasa sosial dan penanganan bencana; (3) pencarian dana; (4) hukum perikemanusiaan internasional; (5) pengungsi.

Menko Kesra Soepardjo Rustam mengatakan bahwa: (1) ilmu pengetahuan dan teknologi canggih selain meningkatkan kesejahteraan manusia juga dapat membawa bencana karena kesembronoan dalam penerapannya; (2) Palang Merah dapat membantu pemerintah untuk menanggulangi bencana yang timbul; (3) hubungan pemerintah dan gerakan Palang Merah harus dipelihara dan diperkuat (*Kompas*, 5 Agustus 1988).

### 2. Pertemuan Pengobat Tradisional ASEAN

Pertemuan Sistem Pengobat Tradisional ASEAN

yang berlangsung di Bangkok tanggal 19 Juni 1988 membahas: (1) persiapan Kongres ke-3 Perhimpunan Pengobat Tradisional ASEAN yang akan berlangsung di Bangkok, September 1988; (2) pengembangan sistem pengobatan tradisional yang efektif, efisien dan ekonomis (*Antara*, 23 Juni 1988).

Ketua Pengurus Pusat Ikatan Naturopatis Indonesia (INI), Prof. Hembing Wijayakesuma, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 23 Juni 1988 bahwa: (1) penemuan baru sistem pengobatan tradisional dengan sengatan lebah akan diperkenalkan; (2) pengobatan menggunakan lebah jenis *Apis Mellifera* merupakan yang pertama dikembangkan di Indonesia dan di dunia; (3) lebah jenis ini mengandung zat yang efektif untuk merangsang penyembuhan penyakit rematik, pinggang, nyeri syaraf, lumpuh dan pegal linu (*Antara*, 23 Juni 1988).

## I. KERJASAMA SOSIAL DAN TENAGA KERJA

### 1. Seminar Pembangunan dan Pertambahan Penduduk ASEAN

Seminar Pembangunan dan Pertambahan Penduduk ASEAN yang berlangsung di Jakarta tanggal 28 Juni - 1 Juli 1988, dihadiri oleh 70 orang peserta membahas berbagai hasil studi ASEAN di bidang kependudukan dan membuat rekomendasi serta kesimpulan studi.

Seusai melapor Presiden Soeharto di Istana Merdeka tanggal 26 Juni 1988, Kepala BKKBN Pusat Haryono Suyono mengatakan kepada pers bahwa seminar: (1) akan mengadakan peninjauan lapangan mengenai perkembangan KB di Indonesia; (2) akan berdialog dengan pemimpin lembaga kependudukan; (3) bersifat teknis dan menyangkut bentuk kerjasama kependudukan ASEAN di masa mendatang (*Kompas*, 21 Juni 1988).

Wakil Presiden Sudharmono mengatakan pada pembukaan seminar bahwa: (1) seminar itu agar dapat menjadi forum komunikasi dan sumber inspirasi untuk menyempurnakan program kependudukan ASEAN di masa mendatang; (2) seminar agar menghasilkan kesimpulan yang terarah dan terpadu tetapi tetap realistis; (3) seminar diharapkan dapat membantu pemerintah masing-masing untuk menyusun perencanaan dan kebijaksanaan yang lebih sempurna; (4) tukar-menukar pengalaman yang dikembangkan secara teratur sangat besar artinya; (5) masalah kependudukan amat rumit

karena menyangkut banyak segi kehidupan dan masalah; (6) masing-masing negara ASEAN menghadapi masalah keanekaragaman kependudukan; (7) Indonesia mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan menurunkan tingkat kelahiran dan kematian terutama bayi dan anak-anak; (8) pelaksanaan KB bukan merupakan pembatasan hak seseorang karena didasarkan atas kesadaran (*Kompas*, 29 Juni 1988).

Pada kesempatan itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Dr. Saleh Affif mengatakan bahwa: (1) pertumbuhan penduduk per tahun di negara-negara ASEAN dalam periode 1985-2000 akan mencapai 1,8%; (2) dalam jangka waktu 15 tahun mendatang penduduk ASEAN akan meningkat 89 juta jiwa, atau 288 juta jiwa pada tahun 1985 menjadi 377 juta jiwa pada tahun 2000; (3) pertumbuhan penduduk ASEAN pada tahun 2000 direncanakan hanya 1%; (4) memanfaatkan penduduk yang banyak sebagai aset nasional dalam pembangunan merupakan masalah yang pokok dan utama; (5) seminar ini merupakan salah satu sumbangan nyata dari ide Deklarasi Manila (*Antara*, 29 Juni 1988).

Mereka sepakat untuk mendesak: (1) semua organisasi internasional yang berkaitan dengan masalah kependudukan agar melanjutkan dukungannya terhadap program kependudukan ASEAN; (2) para pemimpin program kependudukan ASEAN (AHPP) agar mengambil langkah-langkah untuk menentukan negara donor dan badan-badan internasional yang tidak mempunyai hubungan formal dengan ASEAN; (3) lembaga-lembaga tinggi negara-negara ASEAN agar mengizinkan AHPP mengadakan pendekatan secara tidak resmi kepada masing-masing donor; (4) AHPP agar memprakarsai pembentukan suatu badan ahli untuk mempublikasikan keahlian yang menonjol di kawasan ASEAN. Selain itu, mereka juga mengeluarkan rekomendasi, antara lain: (1) perlu peningkatan pelayanan publikasi program kependudukan ASEAN; (2) mekanisme ASEAN yang kaku menghambat perundingan-perundingan untuk mencari dana dari badan-badan yang tidak memiliki hubungan formal dengan ASEAN; (3) komitmen dukungan negara donor dan badan internasional yang memiliki hubungan formal dengan ASEAN perlu ditinjau kembali (*Antara*, 1 Juli 1988).

## 2. Kerjasama Pemuda ASEAN

Menpora Akbar Tanjung berada di Singapura dan Malaysia tanggal 1-5 Juni 1988 untuk menghadiri peri-

ngatan Hari Belia Kebangsaan di Malaysia, dan memenuhi undangan Menteri Pembangunan Masyarakat Singapura Wong Kan Seng.

Seusai melapor kepada Presiden Soeharto di Bina Graha tanggal 21 Juni 1988, Menpora Akbar Tanjung mengatakan bahwa: (1) Indonesia, Malaysia dan Singapura telah menandatangani Memorandum of Understanding tentang kepemudaan untuk meningkatkan frekuensi kunjungan antara para pimpinan organisasi kepemudaan; (2) Presiden Soeharto meminta agar kerjasama kepemudaan untuk mewujudkan semangat ASEAN antara ketiga negara ASEAN itu diperluas hingga mencakup negara-negara ASEAN lainnya (*Antara*, 21 Juni 1988).

## J. KERJASAMA EKONOMI DAN PERDAGANGAN

Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia, Prof.-Dr. M. Sadli, mengatakan di Jakarta tanggal 3 Agustus 1988 bahwa: (1) peningkatan kerjasama ekonomi, perdagangan dan proyek investasi patungan antar negara anggota ASEAN masih lambat; (2) usaha-usaha untuk mempererat kerjasama dengan saling memberikan kemudahan terhambat oleh semangat proteksionisme yang lebih besar daripada kemauan membentuk masyarakat ekonomi regional dari masing-masing anggota; (3) pasaran bersama ASEAN belum saatnya dibentuk mengingat masih banyaknya perbedaan kepentingan nasional masing-masing anggota ASEAN; (4) proyeksi investasi swasta patungan ASEAN yang sudah disetujui belum dapat direalisasikan karena terbentur pada kepentingan nasional masing-masing; (5) tahap awal penyatuan ASEAN bisa dimulai dengan pembebasan visa bagi warga ASEAN yang ingin berkunjung ke negara-negara anggota ASEAN (*Antara*, 3 Agustus 1988).

Ketua Eksekutif Panitia Kerja K-14 Paul Chan mengatakan kepada pers di Singapura tanggal 10 Mei 1988 bahwa: (1) pembentukan K-14 mencerminkan kesungguhan sektor swasta untuk mengkaji pelaksanaan semua hasil KTT ASEAN di Manila; (2) K-14 merupakan badan sementara yang dikendalikan oleh para pemangku jabatan kehormatan; (3) badan ini akan dijadikan sekretariat teknis untuk memperjuangkan masa depan ekonomi ASEAN; (4) ASEAN perlu meningkatkan kerjasama ekonomi untuk menghadapi persaingan perdagangan yang semakin sengit; (5) berbagai hambatan dan

ketidakpastian perdagangan internasional disebabkan oleh persaingan negara-negara maju (*Antara*, 11 Mei 1988).

#### K. SIDANG AFTEX KE-11 DI MANILA

Ketua Federasi Industri Tekstil Indonesia (FITI), Ir. H. Aminuddin, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 1 Agustus 1988 bahwa: (1) FITI akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan informasi secara luas tentang Indonesia, khususnya tentang pembangunan sandang; (2) AFTEX merupakan forum yang baik untuk bertukar pikiran dan pengalaman mengenai dunia pertekstilan; (3) informasi aktual berdasarkan fakta dan data terakhir perlu diberikan untuk menarik para investor; (4) iklim dunia usaha yang normal dan sehat masih menjadi dambaan kalangan bisnis; (5) segala bentuk mata rantai perpanjangan tangan departemen masih menghantui pengusaha; (6) iklim dunia usaha dan persaingan yang sehat tanpa menjurus ke arah liberalisme merupakan kunci keberhasilan; (7) realisasi pelaksanaan deregulasi dan debirokratisasi mungkin dapat mewujudkan iklim yang sehat (*Antara*, 1 Agustus 1988).

Sidang AFTEX ke-11 berlangsung di Manila tanggal 5-6 Agustus 1988 untuk membahas perkembangan industri tekstil negara anggota ASEAN. Hasil sidang yang ditandatangani oleh Donald G. Dee (Ketua AFTEX), dan ketua delegasi masing-masing negara yakni Ir. H. Aminuddin (Indonesia), Songkram Cheevaprawatdomrong (Muangthai), Lam Kam Wang (Malaysia), Cheng Wai Keuang (Singapura) dan Herminigildo Zayo (Filipina), mengatakan antara lain: (1) ASEAN prihatin terhadap berlanjutnya politik proteksionisme negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat; (2) sebagai konsumen kapas yang besar, ASEAN akan berusaha meningkatkan bobotnya di forum Liverpool Cotton Association; (3) kontes desainer ASEAN merupakan promosi ekspor tekstil bersama di pasaran regional dan internasional; (4) ASEAN perlu menetapkan masa transisi untuk menghadapi berakhirnya Multi Fibre Agreement (MFA) tahun 1991, agar para pengusaha industri tekstil ASEAN dapat mengatur dan menyusun struktur operasinya; (5) ASEAN akan melakukan penelitian secara menyeluruh untuk memperoleh jatidiri masing-masing industri tekstil negara anggota ASEAN (*Antara*, 9 Agustus 1988).

Ketua Delegasi FITI, Ir. H. Aminuddin, mengatakan kepada pers di Jakarta tanggal 8 Agustus 1988

bahwa: (1) mandat dan tugas Kadin membuat delegasi FITI diterima sebagai peserta penuh. Hal ini merupakan angin segar dalam forum AFTEX; (2) komitmen-komitmen wakil Indonesia pada sidang-sidang AFTEX sebelumnya banyak yang tidak dipenuhi. Kini citra jelek Indonesia di forum ASEAN dapat diperbaiki; (3) FITI tidak membenarkan pernyataan API sebagai salah satu pendiri AFTEX berhak selamanya mewakili Indonesia di forum ini; (4) kedudukan API hanya sebagai asosiasi yang sejajar dengan anggota asosiasi FITI (*Antara*, 9 Agustus 1988).

#### L. PROYEK PATUNGAN ASEAN

Pada tanggal 4 Agustus 1988, Ketua Kadin Indonesia, Sukamdani Sahid Gitosardjono, mengatakan: (1) banyak usaha patungan swasta yang sudah disepakati belum dapat dilaksanakan karena kurangnya dukungan dari masing-masing pemerintah negara anggota ASEAN; (2) para pejabat pemerintah ASEAN tidak pernah menginformasikan hasil keputusan pertemuan para Menteri Ekonomi kepada dunia usaha; (3) masing-masing pemerintah ASEAN harus lebih terbuka untuk memperlancar peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi antar swasta ASEAN; (5) keikutsertaan sektor swasta dalam pertemuan tingkat pemerintah ASEAN sangat penting untuk memperlancar peningkatan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi intra ASEAN (*Antara*, 4 Agustus 1988).

#### M. KERJASAMA PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Pertemuan Para Ahli Kesehatan Hewan ASEAN berlangsung di Jakarta tanggal 2-5 Agustus 1988 untuk membahas standarisasi vaksin hewan di negara ASEAN. Dirjen Peternakan drh. Soekaji mengatakan pada pembukaan pertemuan itu bahwa: (1) ASEAN kini perlu memiliki standar vaksin pemberantasan penyakit hewan; (2) standar ini memudahkan untuk mengendalikan dan mengatasi berjangkitnya penyakit hewan menular yang berbahaya (*Suara Karya*, 3 Agustus 1988).

#### III. HARI ULANG TAHUN KE-21 ASEAN

Sekretaris Jenderal Sekretariat ASEAN Roderick Yong mengatakan pada HUT ASEAN ke-21 ASEAN di

Jakarta tanggal 8 Agustus 1988 bahwa: (1) KTT ASEAN III di Manila memberikan arah baru bagi program-program kerjasama yang telah ada, seperti: (a) diubahnya Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia). Perubahan ini memungkinkan negara-negara Asia Tenggara lainnya dapat bergabung ke dalam ASEAN (*Analisa*, No. 4, 1988, hal. 256); (b) pembentukan kelompok kerja bidang politik untuk menangani masalah Kamboja, pengungsi, kawasan damai, bebas dan netral (ZOPFAN) dan kawasan bebas senjata nuklir (NWFZ); (2) dekade mendatang merupakan tantangan bagi ASEAN untuk mencapai kerjasama yang lebih kokoh guna mewujudkan tujuan-tujuannya; (3) perbaikan pengaturan preferensi perdagangan (Preferential Trading Arrangement atau PTA) dan program-program usaha patungan seperti ASEAN Industrial Joint Venture (AIJV) merupakan kemajuan yang dicapai di bidang ekonomi; (4) kerjasama fungsional ASEAN dipusatkan pada tiga masalah penting yakni peningkatan kesadaran mengenai ASEAN, perluasan keterlibatan dan partisipasi masyarakat ASEAN dalam berbagai bidang kerjasama serta pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi; (5) komite-komite ASEAN akan memusatkan diri pada program yang berorientasi pada kemajuan masyarakat, khususnya wanita dan pemuda; (6) pelaksanaan proyek-proyek merupakan usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ASEAN dan kekayaan budayanya (*Antara*, 8 Agustus 1988).

#### IV. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MITRA-MITRANYA

##### A. PERTEMUAN ASEAN DENGAN MITRA DIALOGNYA

Pertemuan ASEAN dengan mitra dialognya yang berlangsung di Bangkok tanggal 7-9 Juli 1988, dihadiri oleh Menlu AS, George Shultz, Menlu Australia, William Hayden, Menlu Jepang, Sousuke Uno, Menlu Kanada, Jos Clarke, Menlu Jerman Barat, Hans Dietrich Genscher, Menlu Selandia Baru, Russel Marshall, Menlu Spanyol, Francisco Fernandes Ordenez, Presiden Dewan Menteri Masyarakat Eropa/Deputi Menlu Yunani, Theodoros Pangalos, dan Ketua Komisi Masyarakat Eropa, Claude Cheysson serta delegasi ASEAN yang terdiri atas Menlu Malaysia, Abu Hassan Omar (selaku Ketua Delegasi), Menlu Indonesia, Ali Alatas,

Menlu Muangthai, Siddhi Savetsila, Menlu Singapura, Suppiah Dhanabalan, Menlu Brunei Darussalam, Mohammad Bolkiah, dan Menlu Filipina, Raul Manglapus (*Kompas*, 7 Juli 1988).

Menlu Siddhi Savetsila mengatakan pada pembukaan dialog bahwa: (1) pasaran negara mitra dialog agar terbuka bagi produk-produk ekspor ASEAN, yang selama ini sangat menentukan pertumbuhan dan stabilitas ASEAN; (2) apa pun kebijaksanaan ekonomi yang diambil oleh negara-negara industri jangan sampai merugikan ASEAN; (3) keputusan KTT Manila untuk memperbaiki usaha patungan industri ASEAN merupakan usaha untuk menarik penanam modal ASEAN dan negara-negara non-ASEAN. Dengan demikian ASEAN diharapkan menjadi pasaran regional yang terpadu; (4) penyelesaian konflik Kamboja dapat dicapai melalui: (a) penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja; (b) rekonsiliasi nasional; (c) pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri rakyat Kamboja untuk membentuk negara yang merdeka, netral dan non-blok; (5) untuk mencegah berkuasanya kembali Khmer Merah, semua pihak yang berkepentingan atas masa depan Kamboja agar mendukung peranan Pangeran Norodom Sihanouk untuk menyelesaikan masalah Kamboja. Oleh karena itu ancaman yang dikhawatirkan negara-negara Barat dapat dinetralisasikan; (6) konperensi internasional merupakan strategi baru yang efektif untuk menanggulangi masalah pengungsi Indocina, yang penyelenggaraannya diharapkan berlangsung awal tahun 1989 (*Antara*, 7 Juli 1988).

Pada acara yang sama Menlu George Shultz mengatakan bahwa: (1) kelompok kerja mengenai pengungsi Indocina perlu dibentuk sebelum konperensi internasional tentang pengungsi Indocina diselenggarakan; (2) kelompok kerja itu dapat menjajaki pendapat negara lain, menetapkan pandangan baru dan mengkaji kemungkinan keberhasilan penyelenggaraan konperensi internasional (*Antara*, 7 Juli 1988); (3) Hanoi agar menyetujui kebijaksanaan politik dan ekonomi ASEAN dan negara-negara pendukungnya mengenai pengungsi, yang memungkinkan pengungsi Indocina hidup produktif di negerinya sendiri; (4) tekanan diplomatik dan ekonomi terhadap Hanoi harus terus dilakukan oleh ASEAN dan pendukung-pendukungnya. Untuk ini ASEAN dapat mengandalkan kesetiaan AS; (5) dukungan terhadap Pangeran Norodom Sihanouk dan kelompok-kelompok perlawanan non-komunis sangat penting, karena mereka sebagai kunci penyelesaian masalah Kamboja; (6) meskipun usaha menyelesaikan konflik Kamboja mengalami kemajuan, ASEAN dan negara-negara pen-

dukungnya harus tetap waspada terhadap maksud-maksud Vietnam (*Antara*, 8 Juli 1988).

Menlu Sousuke Uno mengatakan bahwa: (1) Vietnam sebagai negara asal pengungsi agar mencegah keluarnya para pengungsi; (2) Jepang tetap ikut menanggulangi pengungsi Vietnam melalui program pemukiman, bantuan dana melalui PBB dan memberikan suaka (*Antara*, 7 Juli 1988); (3) Jepang akan membiayai segala kegiatan pasukan pemelihara perdamaian internasional, mengirim personil tim pemantau internasional bagi terselenggaranya pemilu di Kamboja dan membantu menyediakan berbagai kebutuhan material non-militer yang diperlukan; (4) ASEAN dan mitra dialognya agar membantu mengusahakan perdamaian di Kamboja melalui usaha: (a) penarikan seluruh pasukan Vietnam di bawah pengawasan internasional menurut jadwal yang telah ditetapkan; (b) pemulihan Kamboja yang non-blok, netral dan independen melalui pembentukan pemerintahan sementara yang disetujui kelompok-kelompok Kamboja yang bertikai, disusul pemilu yang bebas di bawah pengawasan internasional; (c) kerjasama internasional yang menjamin penyelesaian konflik Kamboja (*Antara*, 8 Juli 1988); (5) Jepang akan meningkatkan kerjasama ekonomi dan memperkuat sistem perdagangan bebas dengan negara-negara ASEAN. Peningkatan kerjasama ekonomi itu dilakukan antara lain dengan memperluas kuota Jepang atas impor barang-barang industri dan mineral dari ASEAN; (6) kerjasama ekonomi dengan ASEAN akan diprioritaskan; (7) Jepang juga akan meningkatkan kerjasama politik untuk membantu menciptakan perdamaian, kemakmuran dan stabilitas di kawasan Asia-Pasifik; (8) hubungan Jepang-ASEAN harus menjadi contoh hubungan kerjasama di antara negara-negara di kawasan Asia-Pasifik; (9) Jepang menolak untuk menjadi negara yang mempunyai kekuatan militer besar, meskipun Jepang sebagai negara industri kedua di dunia. Jepang tidak ingin menjadikan dirinya sebagai ancaman terhadap negara tetangga-tetangganya (*Antara*, 9 Juli 1988).

Pada kesempatan itu Menlu Abu Hassan Omar juga mengatakan bahwa: (1) ASEAN dan Jepang telah menandatangani Perjanjian Pelaksanaan Dana Pembangunan ASEAN-Jepang senilai US\$2 milyar; (2) sebagai negara yang memegang dominasi ekonomi dunia, Jepang agar mampu mengemudikan sistem perdagangan secara adil dan jujur; (3) komitmen Jepang untuk menghapuskan proteksionisme, membuka pasar bagi produk negara-negara berkembang, mengurangi tingkat fluktuasi kurs mata uang dan mengusahakan stabilitas

harga berbagai komoditi merupakan suatu tindakan yang penting sekali; (4) ASEAN percaya bahwa Jepang akan menangani masalah hutang dan suku bunga yang menjadi beban negara-negara ASEAN secara bijaksana; (5) Jepang diharapkan untuk memajukan industri berskala menengah dan kecil ASEAN (*Antara*, 9 Juli 1988).

Menlu Russel Marshall mengatakan bahwa: (1) Selandia Baru mempunyai pandangan yang sama dengan ASEAN mengenai upaya menyelesaikan masalah Kamboja; (2) Selandia Baru memahami sekali beban berat ASEAN untuk menampung pengungsi Indocina; (3) dukungan Selandia Baru terhadap kawasan bebas senjata nuklir di Pasifik Selatan merupakan pernyataan penting hak-hak negara kecil yang tidak berbeda dengan negara besar dalam masalah perlucutan senjata; (4) usaha memperkuat organisasi regional Pasifik Selatan terus diperjuangkan, agar suara negara-negara di kawasan itu lebih didengar di dunia internasional (*Antara*, 7 Juli 1988).

Menlu Ali Alatas mengemukakan perlunya keterlibatan pihak swasta dalam kerjasama industri ME dan ASEAN. Lebih lanjut Menlu Indonesia itu mengatakan bahwa: (1) pembentukan pasaran bersama ME tahun 1992, diharapkan tidak merugikan perdagangan ASEAN dengan ME; (2) stabilnya sistem moneter, serta adil dan terbukanya sistem perdagangan internasional akan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dunia; (3) peranan GSP Masyarakat Eropa sangat penting untuk meningkatkan ekspor ASEAN ke ME; (4) ASEAN prihatin atas prosedur ME mengenai anti dumping investigation yang merugikan produk-produk negara-negara berkembang (*Antara*, 8 Juli 1988).

Dalam pertemuan itu, Para Menlu ASEAN dan Kanada telah menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) mengenai program pasca panen ASEAN (*Antara*, 8 Juli 1988).

Menlu Kanada, Jos Clarke, mengatakan pada pertemuan tanggal 8 Juli 1988 bahwa: (1) bantuan Kanada untuk tahap kedua akan ditingkatkan menjadi US\$3,5 juta. Bantuan tahap pertama hanya US\$300 ribu; (2) perdagangan ASEAN-Kanada dalam tahun 1987 mencapai US\$1,9 milyar dan dalam tahun 1988 diharapkan meningkat menjadi US\$2 milyar (*Antara*, 8 Juli 1988).

Dalam pertemuan tanggal 9 Juli 1988, Para Menlu ASEAN dan Australia telah menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) untuk meningkatkan

kerjasama ekonomi. Menlu Filipina selaku Wakil ASEAN, Raul Manglapus, mengatakan bahwa: (1) program kerjasama ekonomi ASEAN-Australia telah mengeluarkan ASS80 juta untuk membiayai 27 proyek, yang meliputi kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi, pangan dan pertanian, perdagangan dan pembangunan sosial; (2) Australia mendukung suatu program bantuan ekonomi multilateral untuk membangun perekonomian Filipina (*Antara*, 11 Juli 1988).

## B. HUBUNGAN ASEAN-AUSTRALIA

Forum ASEAN-Australia ke-11 berlangsung di Manila tanggal 9 Juni 1988 untuk membahas tarif impor, proyek-proyek patungan, desentralisasi kebijaksanaan perdagangan Australia dan Program Kerjasama Ekonomi ASEAN-Australia (ASEAN-Australian Economic Cooperation Programme atau AAACP). Negara-negara ASEAN menyatakan keprihatinan atas situasi perdagangannya dengan Australia yang sejak 1985 sampai 1987 terus menguntungkan Australia. Surplus perdagangan keseluruhan Australia dengan ASEAN sejak 1983 telah mencapai sekitar A\$6 milyar (*Antara*, 9 Juni 1988).

## C. HUBUNGAN ASEAN-JEPANG

Delegasi Parlemen Jepang yang terdiri atas empat orang anggota, yakni: Hideo Watanabe, Fujinami, Therukisa Isiwatani dan Takashi Kataoka berada di Indonesia tanggal 30 April - 4 Mei 1988 untuk mengadakan pembicaraan dengan Presiden Soeharto mengenai pembentukan Lembaga Perdamaian Dunia dan konsep kerjasama ekonomi dan kebudayaan negara-negara Pasifik (*Antara*, 1 Mei 1988).

Fujinami mengatakan kepada pers setelah diterima Presiden Soeharto tanggal 2 Mei 1988 bahwa: (1) membengkaknya hutang Indonesia akibat apresiasi nilai dollar terhadap Yen merupakan tanggung jawab bersama Jepang dan Indonesia; (2) Parlemen Jepang dan Pemerintahan PM Takeshita selalu bekerjasama untuk mengatasi beban hutang negara-negara ASEAN (*Suara Pembaruan*, 2 Mei 1988).

Seorang anggota Komisi I DPR (bidang Hankam, Penerangan dan Luar Negeri), Theo Sambuaga mengatakan di Jakarta tanggal 4 Mei 1988 bahwa: (1) terhambatnya pembangunan ekonomi negara-negara ASEAN

akan mengakibatkan kerugian bagi pemasaran produk-produk Jepang dan suplai bahan mentah ASEAN. Oleh karena itu Jepang agar segera mewujudkan komitmennya untuk memberi bantuan US\$2 milyar kepada negara-negara ASEAN; (2) kunjungan Menlu Jepang, Sou-suke Uno, ke Indonesia tanggal 5-8 Mei 1988 diharapkan dapat mengungkapkan sikap Jepang terhadap tekad ASEAN untuk mewujudkan ZOPFAN (*Antara*, 5 Mei 1988).

Dubes Jepang untuk Indonesia, Sumio Edamura, mengatakan di Jakarta tanggal 5 Mei 1988 bahwa kunjungan Menlu Jepang itu untuk meningkatkan dialog, yang diharapkan dapat membuka era baru hubungan Jepang-Indonesia (*Kompas*, 6 Mei 1988).

Menlu Jepang itu mengatakan setibanya di Jakarta tanggal 5 Mei 1988 bahwa: (1) Indonesia merupakan negara ASEAN pertama yang dikunjungi, karena peranannya yang sangat penting di antara negara-negara ASEAN lainnya; (2) Jepang sebagai sesama negara Asia-Pasifik tetap mendukung dan membantu ASEAN (*Antara*, 6 Mei 1988).

Menlu Malaysia, Abu Hassan Omar, mengatakan di Kuala Lumpur tanggal 30 Juni 1988 bahwa Jepang agar mengusahakan pengaruh apresiasi Yen tidak merugikan ASEAN dan negara-negara berkembang lainnya. Jepang perlu melakukan peninjauan kembali atas ketentuan atau persyaratan pinjaman yang menetapkan jumlah uang yang dipinjam dan uang yang harus dibayarkan kembali. Nilai Yen yang terus meningkat akan menghapuskan sifat pinjaman lunak Jepang (*Antara*, 1 Juli 1988).

Menurut PM Noboru Takeshita, dalam lima tahun mendatang ini Jepang akan meningkatkan bantuan Official Development Assistance (ODA) menjadi US\$50 milyar, dan ASEAN akan tetap mendapatkan 30%-nya, sekitar US\$15 milyar.

Jumlah ini merupakan peningkatan yang tajam dari periode 1982-1986 yang hanya mencapai US\$3,96 milyar.

Pada tanggal 4 Juli 1988, Wakil Dirjen Biro Asia Kementerian Luar Negeri Jepang, Haruhiko Shibuya, mengatakan bahwa: (1) Jepang berusaha memenuhi narapan ASEAN dengan meningkatkan investasi langsung perusahaan-perusahaan Jepang di negara-negara ASEAN; (2) perusahaan-perusahaan swasta Jepang akan didorong untuk meningkatkan investasi dalam industri yang berorientasi ekspor; (3) investasi Jepang ke

ASEAN terus meningkat, 1951-1978 mencapai US\$15.956 juta (11,5% dari seluruh investasi luar negeri Jepang), 1986 mencapai US\$856 juta dan 1987 mencapai US\$1.524 juta; (4) pembagian persentase investasi Jepang di negara-negara ASEAN adalah sebagai berikut, di Indonesia: 32,6%, di Malaysia: 21%, di Muangthai: 36,6%, di Singapura: 21,6% dan di Filipina: 16,1%; (5) Jepang sedang melaksanakan liberalisasi pasarnya bagi komoditi ekspor ASEAN; (6) ASEAN menenggelamkan tarif tinggi Jepang atas produksi ekspor mereka, seperti tarif kayu lapis keras Indonesia dan daging ayam bebas tulang Muangthai (*Pelita*, 5 Juli 1988).

#### D. HUBUNGAN ASEAN DENGAN MASYARAKAT EROPA

Pertemuan antara Para Menlu ASEAN dan ME berlangsung di Dusseldorf tanggal 2-3 Mei 1988 untuk membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan keamanan.

Pada tanggal 1 Mei 1988, Menteri Negara Kementerian Luar Negeri Jerman Barat, Helmut Schaefer, mengatakan bahwa: (1) ASEAN merupakan mitra dialog utama dan terpenting bagi ME; (2) kegiatan ekonomi pasar dan perdagangan bebas antara ASEAN dan ME masih mungkin diperluas (*Antara*, 2 Mei 1988).

Menlu Indonesia selaku koordinator ASEAN, Ali Alatas SH, mengatakan pada pertemuan tanggal 2 Mei 1988 bahwa: (1) kerjasama industri ASEAN-ME harus melibatkan pihak swasta melalui pembentukan Dewan Bisnis ASEAN-ME dan program-program untuk menumbuhkan usaha bisnis kedua perhimpunan regional itu; (2) investasi asing mempunyai peranan penting bagi pembangunan negara-negara ASEAN; (3) untuk meningkatkan iklim investasi, di setiap ibukota negara-negara ASEAN telah dibentuk komite investasi bersama; (4) pertumbuhan ekonomi dunia akan berjalan bila negara-negara berkembang diberi kesempatan untuk memulihkan pembangunannya ekonominya melalui: (a) alih teknologi; (b) kebebasan produk ekspor negara-negara berkembang untuk memasuki pasaran negara maju dan peningkatan kapasitas impornya (*Antara*, 3 Mei 1988).

Menlu Muangthai selaku Ketua Komite Tetap ASEAN, Siddhi Savetsila, mengatakan bahwa: (1) ME agar mendukung perjuangan Pangeran Norodom Sihanouk untuk menghadapi Vietnam; (2) nilai perdagangan antara ME dan ASEAN terus meningkat dan mengun-

tungkan kedua belah pihak; (3) ASEAN mengkhawatirkan kemungkinan ME untuk menerapkan proteksionisme seperti negara-negara maju lainnya (*Kompas*, 3 Mei 1988).

Menlu Jerman Barat, Hans Dietrich Genscher, mengatakan bahwa: (1) ME akan membuka pasaran bagi produk-produk jadi ASEAN; (2) sekitar 50% ekspor produk jadi ASEAN masih bisa ditingkatkan (*Kompas*, 3 Mei 1988).

Komisioner ME, Claudio Cheyson mengatakan bahwa pada tahun 1987 ME mengalami surplus jutaan dollar dalam perdagangannya dengan ASEAN (*Kompas*, 3 Mei 1988).

Menlu Itali, Giulio Andreotti, mengatakan bahwa: (1) dana untuk penanggulangan narkotika yang berasal dari ASEAN, Badan Penanggulangan Narkotika AS dan Organisasi Pengawasan Narkotika Internasional perlu disatukan (*Antara*, 4 Mei 1988).

Pernyataan bersama ASEAN-ME tanggal 3 Mei 1988 adalah sebagai berikut: (1) ME menghargai usaha ASEAN untuk membantu menyelesaikan masalah Kamboja, termasuk penyelenggaraan JIM antara pihak-pihak yang terlibat langsung; (2) ASEAN mengakui bahwa GSP ME telah membantu perluasan ekspor barang-barang jadi ASEAN; (3) ME bersedia memperbaiki kembali rancangan GSP; (4) ASEAN menganggap pemeliharaan dan perluasan kesempatan pemasaran kayu tropis di negara-negara ME sangat penting; (5) ASEAN dan ME prihatin atas ketidakadilan harga-harga komoditi dan pendapatan ekspor negara-negara berkembang. Oleh karena itu ME dan ASEAN menginginkan terselenggaranya kerjasama internasional untuk secara efektif menanggulangi masalah komoditi melalui forum-forum bilateral maupun multilateral. Dengan demikian negara-negara ASEAN dapat menemukan cara untuk menciptakan pertumbuhan, diversifikasi dan perluasan perdagangan komoditi; (6) ASEAN dan ME sepakat untuk mendorong partisipasi pihak swasta untuk memperbaiki hubungan ekonomi dan perdagangan kedua belah pihak; (7) ASEAN dan ME menyambut baik usaha untuk membentuk *Joint Investment Committee (JIC)* di setiap ibukota negara-negara ASEAN dan perlunya penunjukan sebuah Konsultan Investasi Eropa; (8) ASEAN mengakui bahwa ME merupakan sumber bantuan kedua terpenting bagi pembangunannya; (9) ASEAN dan ME puas atas kerjasama mereka dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, yang telah menghasilkan berbagai pertukaran dan kon-

tak antara para pejabat dan para pengusaha kedua belah pihak; (10) ASEAN menghargai bantuan ME untuk membentuk Pusat Latihan dan Riset Manajemen Energi ASEAN-ME di Brunei Darussalam; (11) untuk menciptakan situasi perekonomian internasional yang sehat perlu pengembangan dan penerapan kebijakan yang diarahkan pada intensifikasi, termasuk perbaikan ketidakeimbangan perdagangan moneter (*Suara Karya*, 4 Mei 1988).

## V. PERTEMUAN INFORMAL JAKARTA

### A. PERSIAPAN-PERSIAPAN

Dalam rangka membantu mengakhiri pertikaian bersenjata dan mencapai perdamaian di Kamboja (Kampuchea) dilangsungkanlah Pertemuan Informal Jakarta atau yang lebih dikenal dengan sebutan Jakarta Informal Meeting (JIM). JIM yang berlangsung di Bogor tanggal 25-28 Juli 1988 itu dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama dihadiri oleh para wakil empat kelompok Kamboja yang bertikai, yakni Khmer Merah yang dipimpin oleh Khieu Samphan, Front Pembebasan Nasional Rakyat Kamboja atau Khmer People's National Liberation Front (KPNLF) yang dipimpin oleh Son Sann, Kelompok Fucinpec atau loyalis yang pro Pangeran Norodom Sihanouk, yang dipimpin oleh putera Pangeran Sihanouk, Pangeran Norodom Ranariddh, yang ketiganya tergabung dalam Pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja atau Coalition Government of Democratic Kamboja (CGDK), dan Pemerintah Republik Kamboja (PRK) atau People's Republic of Cambodia yang dipimpin oleh PM Hun Senn. Pada tahap kedua, selain dihadiri oleh para wakil empat kelompok Kamboja itu, JIM dihadiri pula oleh Menlu Vietnam, Nguyen Co Thach, pejabat Menlu Laos, Thongsavath Khaikhamphithoune serta para wakil ASEAN, yang terdiri atas Menlu Ali Alatas, Menlu Malaysia, Abu Hassan Omar, Sekretaris Deplu Muangthai, Kasem S. Kasemsri, Pembantu Menlu Filipina, Manuel T. Yan, Menlu Singapura, Suppiah Dhana-balan dan Menlu Brunei Darussalam, Mohammed Bolkiah.

Khmer Merah merupakan kelompok yang memiliki kekuatan militer terkuat, yang dahulu dipimpin oleh Pol Pot. Khmer Merah berkuasa di Kamboja tahun 1975-1978. Rezim ini dianggap yang bertanggungjawab atas pembunuhan sekitar dua juta penduduk Kamboja selama mereka berkuasa (*Antara*, 26 Juli 1988). Pembu-

nuhan inilah yang menjadi salah satu sebab masuknya tentara Vietnam ke Kamboja untuk menjatuhkan rezim Pol Pot.

Fucinpec atau kelompok loyalis mengklaim mempunyai 17.000 orang anggota.

KPNLF merupakan kelompok terkecil di Kamboja. Kelompok ini dikenal sebagai kelompok konservatif nasionalis atau Khmer Biru.

PRK yang didukung sekitar 150.000 tentara Vietnam merupakan rezim yang menggulingkan pemerintahan Khmer Merah di bawah pimpinan Pol Pot. PRK de facto berkuasa di Kamboja sekarang ini dan dianggap oleh sebagian rakyat Kamboja sebagai pembebas rakyat dari kekejaman rezim Pol Pot.

JIM merupakan pertemuan yang pertama kali bagi semua kelompok Kamboja yang bertikai. Penyelenggaraan JIM ini didasarkan pada Kesepakatan Ho Chi Minh City yang disepakati oleh Menlu Indonesia waktu itu, Mochtar Kusumaatmadja, dan Menlu Vietnam, Nguyen Co Thach, tanggal 29 Juli 1987. Kesepakatan itu mengatakan antara lain bahwa: (1) Vietnam menyetujui rencana pertemuan informal atau Cocktail Party antara kelompok-kelompok Kamboja yang bertikai; (2) pertemuan informal itu akan diselenggarakan atas dasar persamaan kedudukan antara kelompok-kelompok yang bertikai itu tanpa prasyarat-prasyarat (no preconditions) dan embel-embel politik (no political labels); (3) pertemuan dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama hanya dihadiri oleh para wakil kelompok di Kamboja yang bertikai dan pada pertemuan selanjutnya, Indonesia juga akan mengundang negara-negara lain yang terlibat dalam pertikaian bersenjata di Kamboja itu, termasuk Vietnam (*Kompas*, 31 Juli 1987). Indonesia juga menawarkan diri sebagai tuan rumah cocktail party tersebut (*Suara Karya*, 31 Juli 1987). Sesuai dengan Kesepakatan Ho Chi Minh City, Vietnam akan menyampaikan rencana cocktail party itu kepada pemerintah Heng Samrin, dan Menlu Muangthai, Siddhi Savetsila, sebagai Ketua Panitia Tetap ASEAN, akan menyampai-kannya kepada CGDK. (*Suara Karya*, 31 Juli 1988).

Laos, Kamboja dan Vietnam bersedia menghadiri cocktail party. Kesediaan itu diperkuat dengan keputusan Pertemuan Para Wakil Menlu Vietnam, Laos dan PRK yang berlangsung di Phnom Penh tanggal 13 Agustus 1987.

Menlu Mochtar Kusumaatmadja mengatakan di Jakarta tanggal 30 Juli 1987 bahwa Indonesia dan Viet-

nam hanya memberi kondisi untuk mempersiapkan suatu penyelesaian di Kamboja, tetapi penyelesaiannya itu tergantung dari pihak-pihak yang bersengketa di Kamboja sendiri (*Suara Karya*, 31 Juli 1987).

Para Menlu ASEAN mengadakan pertemuan tidak resmi di Bangkok tanggal 16 Agustus 1987 untuk membahas rencana cocktail party. Mereka menyambut gembira rencana cocktail party itu dan minta kepada Vietnam untuk segera hadir setelah diskusi dimulai (*Antara*, 21 Agustus 1987). Di samping itu usul delapan pasal Pangeran Norodom Sihanouk di Beijing, Maret 1986 perlu dijadikan dasar cocktail party (*Kompas*, 21 Agustus 1987).

Penekanan kata segera hadir dan pencantuman usul delapan pasal Pangeran Norodom Sihanouk mendapat reaksi dari Vietnam, yang menyatakan penolakannya atas cocktail party rumusan ASEAN. Vietnam, Laos dan PRK ingin tetap berpegang pada rumusan Kesepakatan Ho Chi Minh City (*Antara*, 21 Agustus 1987).

Para Menlu ASEAN mengadakan pertemuan di Bangkok tanggal 4-5 Juli 1988 untuk membahas rencana penyelenggaraan cocktail party yang akan berlangsung di Jakarta tanggal 25 Juli 1988. Komunike para Menlu ASEAN tentang penyelesaian masalah Kamboja mengatakan antara lain bahwa: (1) menghargai kerja keras bekas Menlu Mochtar Kusumaatmadja selaku interlocutor ASEAN untuk merintis dan meletakkan dasar yang memungkinkan terselenggaranya JIM; (2) mendukung secara penuh penyelenggaraan JIM yang akan datang; (3) menilai bahwa pertemuan informal itu merupakan saat yang menentukan untuk menyelesaikan konflik Kamboja; (4) tidak tercapainya terobosan baru dalam penyelesaian masalah Kamboja, seperti yang diadakan antara Pangeran Norodom Sihanouk dan PM Hun Senn di Paris bulan Desember 1987 dan Januari 1988, menempatkan JIM sebagai forum yang penting artinya. JIM merupakan peluang nyata untuk mencari penyelesaian politik secara menyeluruh mengenai masalah Kamboja (*Kompas*, 6 Juli 1988). Di samping itu Menlu Ali Alatas menyatakan bahwa: (1) Indonesia, sebagai tuan rumah menjamin JIM dilaksanakan berdasarkan kesepakatan Ho Chi Minh City tanggal 29 Juli 1987 dan mengharapkan keempat kelompok Kamboja dan Vietnam hadir dalam JIM; (2) JIM dibagi dua tahap. Tahap pertama, hanya dihadiri oleh keempat kelompok Kamboja dan tahap kedua, selain dihadiri oleh keempat kelompok Kamboja itu, dihadiri pula oleh

wakil pihak yang berkepentingan seperti Vietnam, Laos dan ASEAN (*Kompas*, 9 Juli 1988).

## B. PERSIDANGAN-PERSIDANGAN

Pertemuan tahap pertama tanggal 25 Juli 1988 dibuka oleh Menlu Ali Alatas. Menlu Ali Alatas mengatakan kepada para wartawan sesudah membuka pertemuan itu bahwa: (1) para peserta JIM diminta untuk memisahkan butir-butir pokok (essential ingredients) yang menjadi unsur-unsur dalam suatu penyelesaian dengan cara (modalities) untuk mewujudkan butir-butir itu. Secara umum terdapat penyesuaian pandangan mengenai butir-butir pokok itu, tetapi masih terdapat perbedaan yang tajam mengenai cara-cara mewujudkannya; (2) butir-butir pokok itu antara lain: (a) penarikan mundur pasukan asing dari Kamboja; (b) pembentukan pemerintahan sementara yang terdiri atas para wakil empat kelompok Kamboja untuk mengatur penyelenggaraan pemilihan umum; (c) pembentukan badan internasional untuk mengawasi proses pemilihan umum dan penarikan pasukan asing itu; (d) pembentukan pemerintahan Kamboja yang independen, netral dan nonblok, yang bebas ancaman dari mana pun, yang sebaliknya tidak pula menjadi ancaman bagi negara-negara tetangganya. Kamboja yang seperti itu berada di bawah pemerintahan yang dipilih secara bebas oleh rakyat Kamboja; (f) jaminan negara-negara adikuasa bagi tercapainya penyelesaian Kamboja secara damai oleh semua pihak yang terlibat melalui suatu konferensi internasional. Di samping itu, Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa masalah Kamboja terlalu kompleks oleh sebab itu tidak dapat diselesaikan hanya dalam satu pertemuan. Tetapi tanpa dimulainya dialog dan perundingan untuk menggantikan konflik dan konfrontasi militer, penyelesaian secara menyeluruh di Kamboja sulit tercapai (*Kompas*, 26 Juli 1988).

Dalam pertemuan tahap pertama tanggal 25 Juli 1988 itu, PM Hun Senn mengajukan usul tujuh pasal yang intinya menolak usul pembubaran rezim Kamboja mana pun, dan sebaliknya mengusulkan status quo politisi dan militer sampai terbentuk suatu pemerintahan baru melalui pemilihan umum. Ketujuh pasal usul itu adalah sebagai berikut: (1) pembentukan Kamboja yang damai, independen, demokratis, berdaulat, netral dan nonblok; (2) penarikan semua pasukan Vietnam dari Kamboja pada bulan Desember 1989, atau selambat-lambatnya triwulan pertama tahun 1990. Penarikan ini bersamaan waktunya dengan berakhirnya semua ban-

tuan asing dan peniadaan wilayah perlindungan (sanctuary) bagi kaum pengikut Pol Pot dan pasukan perlawanan lainnya. Ditegaskan pula mengenai larangan memanfaatkan pengungsi untuk menyerang rakyat Kamboja, serta penghentian campur tangan asing atas urusan dalam negeri Kamboja; (3) masalah dalam negeri Kamboja harus diselesaikan sendiri oleh kelompok-kelompok Kamboja atas dasar rekonsiliasi nasional, pelenyapan pemimpin rezim Pol Pot yang bertanggungjawab atas banyaknya kejahatan serta penolakan pengakuan terhadap pasukan bersenjata Khmer Merah; (4) pembentukan status quo di Kamboja sampai selesainya pemilihan para anggota Majelis Nasional Kamboja, yang kemudian akan mensahkan konstitusi baru dan membentuk suatu pemerintahan koalisi; (5) pembentukan Dewan Rekonsiliasi Nasional yang terdiri atas para wakil keempat kelompok di Kamboja, yang diketuai oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Dewan ini bertugas antara lain untuk melaksanakan semua persetujuan yang telah dicapai antara berbagai kelompok di Kamboja dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Majelis Nasional; (6) pembentukan Komisi Pengawas Internasional untuk mengawasi pelaksanaan semua persetujuan; (7) penyelenggaraan suatu konferensi internasional yang dihadiri oleh Kamboja, Vietnam, Laos, semua negara ASEAN, Ketua KTT Nonblok ke-6, ke-7 dan ke-8, Uni Soviet, RRC, Inggris, Perancis, AS, Sekjen PBB dan semua negara yang telah menyumbang tercapainya perdamaian di Kamboja dan Asia Tenggara, untuk menjamin kemerdekaan, kedaulatan dan netralitas Kamboja yang nonblok serta perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara (*Kompas*, 26 Juli 1988). PM Hun Senn secara tegas mengatakan pula kepada para wartawan bahwa RRC-lah yang memberi bantuan keuangan dan militer kepada gerakan perlawanan di Kamboja, yang disalurkan lewat Muangthai (*Kompas*, 26 Juli 1988).

Pada pertemuan tahap kedua tanggal 25 Juli 1988, para wakil keempat kelompok di Kamboja, ASEAN, Vietnam dan Laos berhasil berbicara satu sama lainnya secara langsung mengenai prinsip-prinsip untuk menyelesaikan masalah Kamboja. Di samping itu, keempat kelompok Kamboja itu berhasil pula menyepakati empat masalah pokok mengenai tujuan pembicaraan mereka, yakni: (1) untuk segera mengakhiri konflik Kamboja; (2) untuk segera mengakhiri penderitaan rakyat Kamboja; (3) menyadari bahwa merupakan hal yang penting dan telah tiba waktunya bagi mereka untuk menyelesaikan masalah Kamboja melalui cara-cara politik; (4) secara prinsip Kamboja nantinya adalah in-

dependen, netral dan nonblok (*Kompas*, 26 Juli 1988).

Keempat kelompok ini juga menyepakati usul Pangeran Ranariddh untuk bersama-sama menghadap Pangeran Norodom Sihanouk, yang telah tiba di Indonesia untuk memenuhi undangan pribadi Presiden Soeharto.

Sementara itu, Menlu Nguyen Co Thach mengatakan bahwa: (1) penyelesaian masalah Kamboja harus berhubungan erat dengan penciptaan perdamaian abadi di Asia Tenggara, yang sekaligus juga sebagai usaha untuk membentuk mekanisme pemecahan perselisihan di antara negara-negara Asia Tenggara secara damai; (2) setiap orang menyadari eratnya hubungan antara masalah Kamboja dan perdamaian di Asia Tenggara, meskipun pendekatan terhadap masalah itu berbeda-beda. Selama 10 tahun terakhir ini, muncul tiga macam pendekatan yang berbeda, yakni: (a) penyelesaian masalah Kamboja merupakan prasyarat pembentukan zona damai di Asia Tenggara; (b) pembentukan zona damai di Asia Tenggara merupakan langkah awal untuk menciptakan suasana yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah Kamboja; (c) mengusahakan penyelesaian masalah Kamboja sejajar dengan pembentukan zona damai di Asia Tenggara; (3) Vietnam mengusulkan agar pembentukan zona damai di Asia Tenggara harus diciptakan untuk menyelesaikan masalah Kamboja, karena penyelesaian masalah Kamboja sebagai prasyarat terciptanya zona damai di Asia Tenggara ternyata sampai dewasa ini belum menunjukkan hasil yang nyata (*Kompas*, 26 Juli 1988); (4) kegagalan menyelesaikan masalah Kamboja disebabkan antara lain oleh penonjolan kepentingan pribadi, misalnya hanya menuntut penarikan mundur semua tentara Vietnam dari Kamboja tanpa memperhatikan kepentingan rakyat Kamboja dan tuntutan lain; (5) setiap penyelesaian masalah Kamboja tidak akan diterima oleh rakyat Kamboja maupun dunia, bila tidak dibarengi dengan pembubaran rezim Pol Pot. Sampai dewasa ini tindakan kriminal berdarah rezim Pol Pot masih menghantui rakyat Kamboja (*Antara*, 26 Juli 1988).

Selama ini ASEAN menentang usul Vietnam tersebut. ASEAN berpendapat bahwa penyelesaian masalah Kamboja merupakan prasyarat untuk membentuk zona damai, bebas dan netral di kawasan Asia Tenggara.

Pemimpin KPNLF Son Sann mengatakan bahwa: (1) KPNLF dan rakyat Kamboja ingin hidup berdampingan secara damai dengan rakyat Vietnam; (2) penarikan secara menyeluruh pasukan Vietnam dari Kambo-

ja akan mempercepat rujuk nasional antara kelompok-kelompok Kamboja yang bertikai; (3) penarikan mundur pasukan Vietnam itu akan memberikan kesempatan pula kepada para pemimpin dan rakyat Vietnam untuk memecahkan berbagai kesulitan ekonomi, sosial dan politik yang dihadapi selama ini (*Antara*, 26 Juli 1988).

Keberhasilan pertemuan hari pertama memperlan- car pertemuan hari kedua. Pada tanggal 26 Juli 1988, JIM mulai mendiskusikan materi-materi yang dipan- dang dapat membantu menyelesaikan masalah Kambo- ja dan kaitannya dengan situasi kawasan Asia Tengga- ra, seperti penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja dan mencegah kembalinya rezim Pol Pot, jad- wal waktu penarikan mundur pasukan Vietnam, perlu tidaknya gencatan senjata dan penghentian permusuhan di antara mereka.

Menlu Ali Alatas mengatakan kepada para warta- wan bahwa pada prinsipnya semua pihak yang terlibat dalam konflik Kamboja mulai menunjukkan tanda- tanda yang mengarah kepada kesatuan pandangan atas berbagai aspek yang muncul dalam penyelesaian masa- lah Kamboja, misalnya: (1) penarikan mundur pasukan asing dari Kamboja dan kepastian tidak berkuasanya kembali rezim Pol Pot di negara itu; (2) pembentukan pemerintahan transisi yang terdiri atas para wakil empat kelompok di Kamboja (*Kompas*, 27 Juli 1988).

Sementara itu, selain menegaskan kembali usul-usul PM Hun Senn, Menlu Nguyen Co Thach mengatakan bahwa: (1) semua pihak menyetujui bahwa penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja merupakan bagian integral untuk menyelesaikan masalah di negara itu, bahkan pihak Khmer Merah tidak menolak untuk membahas penarikan pasukan Vietnam dan pencegahan berkuasanya kembali rezim Pol Pot sebagai dua masa- lah yang menentukan penyelesaian Kamboja; (2) dia belum dapat menyatakan persetujuannya mengenai per- lunya dibentuk pasukan perdamaian internasional, karena contoh pembentukan pasukan perdamaian di Kongo dan Libanon justru merusak perdamaian (*trou- ble making force*) dan tidak menjaga perdamaian. Pasukan semacam itu akan menciptakan Kamboja sebagai Libanon di Asia Tenggara (*Antara*, 27 Juli 1988).

Pejabat Menlu Laos, Thongsavath Khaikhamphi- thoune mengatakan bahwa usaha penyelesaian masalah Kamboja berkaitan erat dengan usaha untuk menjadi- kan Asia Tenggara sebagai kawasan bebas, stabil dan bersahabat. Untuk menjadikan kawasan Asia Tenggara

yang seperti itu, Laos mengajukan usul tujuh prinsip, sebagai berikut: (1) Asia Tenggara harus dibangun men- jadi kawasan yang bebas, damai, netral, tanpa senjata nuklir, bersahabat dan bekerjasama untuk menyum- bangkan perdamaian dan pembangunan dunia; (2) ter- dapat sikap saling menghormati masing-masing ke- daulatan, kemerdekaan, integritas wilayah dan rezim politik serta non-agresi di kawasan Asia Tenggara; (3) negara-negara Asia Tenggara tidak menciptakan atau terlibat dalam aliansi militer, baik dengan negara- negara di dalam atau di luar kawasan Asia Tenggara un- tuk menentang satu sama lain, dan tidak menggunakan wilayah satu negara atau mengizinkan negaranya untuk dijadikan alat untuk memusuhi negara lain; (4) setiap konflik di Asia Tenggara diselesaikan secara damai sesuai dengan Piagam PBB; (5) kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara di berbagai sektor, seperti ekonomi, sosial dan budaya perlu ditingkatkan untuk pembangunan kawasan; (6) untuk menjamin ter- capainya prinsip-prinsip itu; para Menlu negara-negara Asia Tenggara perlu mengadakan pertemuan dan kon- sultasi tahunan; (7) setiap negara di Asia Tenggara dapat bekerjasama atau meminta bantuan tidak mengi- kat dari luar atau organisasi internasional (*Suara Karya*, 27 Juli 1988).

Pada pertemuan hari kedua itu, Son Sann mengaju- kan usul empat pasal untuk mencapai perdamaian di Kamboja, sebagai berikut: (1) perlunya mengakhiri penderitaan rakyat Kamboja; (2) pengakuan rakyat Kamboja untuk menentukan nasib sendiri; (3) perlunya dibentuk satu Kamboja yang bebas, netral dan non- blok; (4) perlunya dibentuk pemerintahan baru di Kam- boja yang terdiri atas para wakil empat kelompok di Kamboja (*Kompas*, 27 Juli 1988).

Menlu Suppiah Dhanabalan mengatakan antara lain bahwa: (1) penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja merupakan kunci untuk menyelesaikan masa- lah Kamboja. Masalah ini harus merupakan bagian dari penyelesaian politik atas masalah Kamboja; (2) sejak semula ASEAN menentang invasi Vietnam ke Kambo- ja. Sikap ini diambil bukan untuk mengembalikan kekuasaan rezim Pol Pot, melainkan untuk mengemba- likan kemerdekaan, kedaulatan dan hak rakyat Kambo- ja untuk menentukan nasibnya sendiri; (3) ASEAN mengharapkan kepada pihak-pihak yang berkepenting- an dan masyarakat internasional agar mengambil lang- kah-langkah untuk menghindarkan salah satu kelom- pok mengambil-alih kekuasaan menyusul penarikan mundur pasukan Vietnam itu; (4) persoalan rezim Pol

Pot perlu dikaitkan dengan aspek internal dan eksternal. Hadirnya beberapa pihak tertentu dalam JIM ini mengisyaratkan mereka tentang fenomena Pol Pot dan Khmer Merah yang bukan merupakan kejadian yang berdiri sendiri dalam sejarah Kamboja; (5) mengingat munculnya dua kelompok Kamboja yang dahulu berasal pula dari gerakan revolusioner yang dipimpin Pol Pot dan hadirnya pihak non-Kamboja yang membantu Khmer Merah merebut kekuasaan di Kamboja, diharapkan semua pihak untuk tidak mengajukan permintaan-permintaan, tetapi sebaliknya ikut mencari pemecahan-pemecahan, baik internal maupun eksternal, sehingga sejarah Kamboja tidak terulang lagi (*Kompas*, 27 Juli 1988). Atas dasar itu semua, Menlu Suppiah Dhanabalan mengajukan usul enam langkah untuk menyelesaikan masalah Kamboja, sebagai berikut: (1) mengidentifikasi anggota-anggota Pol Pot yang benar-benar tidak diijinkan kembali ke Kamboja; (2) mengusahakan kerujukan (rekonsiliasi) di antara empat kelompok Kamboja yang bertikai, serta membentuk pemerintahan sementara yang terdiri atas para wakil empat kelompok di Kamboja itu di bawah pimpinan Pangeran Norodom Sihanouk; (3) menjamin terhindarnya dominasi satu kelompok terhadap kelompok yang lain melalui checks and balances, termasuk jaminan internasional; (4) mengusahakan terintegrasinya kekuatan-kekuatan militer di Kamboja secara seimbang, yang didahului dengan pembubarisan angkatan-angkatan bersenjata dari kelompok-kelompok Kamboja itu; (5) menerima pengawas internasional atau pasukan pemeliharaan perdamaian, yang anggota-anggotanya harus disetujui oleh semua kelompok di Kamboja; (6) pemilihan umum yang diawasi oleh badan internasional (*Antara*, 27 Juli 1988).

Ketua Delegasi Muangthai, Kasem S. Kasemsri mengatakan pada pertemuan tahap kedua tanggal 26 Juli 1988 bahwa: (1) rakyat Kamboja agar diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan nasibnya sendiri; (2) harus diusahakan mekanisme atau pengaturan yang efektif untuk menjamin tidak terulangnya lagi permusuhan di Kamboja setelah penarikan mundur pasukan asing dari negara itu. Pengaturan itu dapat berbentuk Pasukan Pemeliharaan Perdamaian Internasional (IPKF) atau Badan Pengawas Internasional (IOC). Dengan demikian dapat diketahui titik-titik temu yang dapat dicapai ataupun perbedaan-perbedaan yang masih besar. Hal ini sangat berguna untuk membantu mengusahakan perdamaian yang adil di Kamboja; (3) penyelesaian politik atas masalah Kamboja harus segera tercapai, karena akan sangat berarti bagi tercapainya

perdamaian dan stabilitas di Kamboja. Cepatnya penyelesaian masalah Kamboja sangat berguna untuk menghilangkan penderitaan rakyat di negara itu maupun untuk mencapai perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara (*Antara*, 27 Juli 1988).

Pada tanggal 27 Juli 1988, para pemimpin empat kelompok Kamboja itu mengadakan kunjungan kehormatan kepada Presiden Soeharto, serta mengadakan pertemuan dengan Pangeran Norodom Sihanouk di Wisma Negara, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Pangeran Norodom Sihanouk mengajukan usul lima pasal untuk menyelesaikan masalah Kamboja, sebagai berikut: (1) nama negara mereka adalah Kampuchea (bahasa Khmer), Cambodge (bahasa Perancis) atau Cambodia (bahasa Inggris), dengan bendera dan lagu kebangsaan baru akan dikarang oleh para wakil keempat kelompok Kamboja. Nama negara yang demikian ini diharapkan dapat mempersatukan tujuh juta rakyat Kamboja, baik mereka yang berasal dari golongan ningrat, republikan, komunis, nasionalis, anti komunis, kanan, tengah, kiri, kapitalis maupun sosialis; (2) pembentukan pemerintahan yang terdiri atas wakil-wakil empat kelompok di Kamboja, dengan tiap-tiap kementerian, termasuk luar negeri dan pertahanan nasional, dibagi sama antara keempat kelompok dan terdiri atas empat menteri bersama, sehingga terdapat sistem persaudaraan yang terbagi sempurna (*Suara Pembaruan*, 27 Juli 1988); (3) pembentukan tentara nasional Kampuchea yang terdiri atas keempat angkatan bersenjata dari kelompok-kelompok di Kamboja itu dengan empat Kepala Staf Umum (*Antara*, 28 Juli 1988); (4) pembentukan pemerintahan nasional bersamaan dengan dilakukannya perubahan administrasi nasional secara bertahap, dari sistem satu partai ke ketatalaksanaan empat partai; (5) penyelenggaraan konperensi internasional tentang Kampuchea di bawah naungan Sekjen PBB, Javier Perez de Cuellar dan bukan di bawah naungan PBB. Konperensi ini akan menjamin netralitas Kampuchea dan mengirimkan Komisi Pengawas Internasional (IOC) yang para anggotanya dipilih oleh para peserta konperensi. IOC bertugas mengawasi penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kampuchea dan membantu pemerintah empat kelompok Kamboja menjaga dan menjamin keamanan rakyat serta mengawasi pemilihan umum di Kampuchea (*Antara*, 28 Juli 1988).

Seusai pertemuan 27 Juli 1988, Menlu Nguyen Co Thach mengatakan bahwa para peserta JIM, baik yang terlibat langsung maupun yang hanya berkepentingan dalam masalah Kamboja itu, menyadari terdapatnya

hal-hal yang dapat maupun yang tidak dapat disepakati. Yang dapat disepakati adalah prinsip-prinsip umum untuk menyelesaikan masalah Kamboja, seperti: (1) masalah Kamboja harus diselesaikan melalui penyelesaian politik; (2) penyelesaian masalah Kamboja berkaitan dengan pembentukan zona damai, bebas dan netral (ZOPFAN) di Asia Tenggara; (3) terdapat dua masalah pokok dalam penyelesaian Kamboja, yakni penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja dan pencegahan kembalinya rezim Pol Pot; (4) pembentukan suatu pemerintahan rekonsiliasi nasional dan suatu badan pengawas internasional di Kamboja; (5) diselenggarakannya Konperensi Internasional untuk membahas penyelesaian masalah Kamboja dan perdamaian di Asia Tenggara (*Kompas*, 28 Juli 1988). Sedangkan beberapa masalah yang tidak dapat disepakati antara lain: (1) bagaimana langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencegah berkuasanya kembali rezim Pol Pot; (2) bagaimana bentuk rekonsiliasi nasional dan badan pengawas internasional yang diinginkan; (3) siapa yang hadir; kapan dan di mana Konperensi Internasional tentang Kamboja diselenggarakan (*Kompas*, 28 Juli 1988).

Sementara itu dalam keterangan pers terpisah, pemimpin KPNLF Son Sann mengatakan bahwa: (1) pihaknya mendukung perlunya pembentukan tiga badan internasional sebagai kelanjutan dari JIM, yakni Badan Supervisi dan Pengawasan Internasional, Badan Pengawas Perdamaian Internasional, dan Komisi Internasional mengenai Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia; (2) sebagai rakyat Kamboja, dia mendukung usul lima pasal Pangeran Norodom Sihanouk; (3) penghentian bantuan asing kepada kelompok perlawanan di Kamboja bukan merupakan sesuatu hal yang penting, justru yang paling penting adalah bagaimana membuat penarikan mundur pasukan Vietnam dari negerinya merupakan langkah awal terciptanya perdamaian di Kamboja; (4) dia mengharapkan Menlu Vietnam bersedia mengadakan perundingan langsung dengan para kelompok perlawanan di Kamboja untuk membicarakan jadwal penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja, sekaligus menyampaikan keinginannya sehubungan dengan penarikan pasukan itu (*Kompas*, 28 Juli 1988).

### C. HASIL PERTEMUAN

JIM berakhir tanpa suatu komunikasi atau pernyataan bersama. Tetapi Menlu Ali Alatas yang didampingi Menlu Singapura, Suppiah Dhanabalan, dan PM PRK, Hun Senn mengatakan kepada para wartawan setelah berakhirnya JIM itu bahwa: (1) JIM sepakat untuk membentuk suatu Kelompok Kerja tingkat pejabat senior dari semua peserta JIM untuk menelaah aspek-aspek khusus bagi penyelesaian masalah Kamboja; (2) Kelompok Kerja itu harus menyelesaikan tugasnya paling lambat bulan Desember 1988, dan membuat rekomendasi untuk pertemuan berikutnya, termasuk tempat, waktu, jenis pertemuan dan sebagainya (*Suara Karya*, 29 Juli 1988). Selanjutnya Menlu Ali Alatas mengatakan bahwa: (1) tujuan JIM adalah untuk menyediakan kerangka bagi diskusi informal di antara pihak-pihak yang terlibat langsung maupun yang berkepentingan atas penyelesaian Kamboja secara menyeluruh, adil dan langgeng; (2) semua peserta JIM menyetujui mengenai perlunya pemecahan masalah Kamboja secara politis, karena hal ini dapat memberikan sumbangan bagi terciptanya perdamaian dan stabilitas kawasan Asia Tenggara; (3) semua pihak bersedia mengidentifikasi titik-titik temu penyelesaian masalah Kamboja; (4) terdapat kesamaan pengertian di antara para peserta JIM mengenai segera diakhirinya kesengsaraan rakyat Kamboja dan perlunya segera mendirikan pemerintahan Kamboja yang berdaulat, netral dan nonblok berdasarkan penentuan nasib sendiri dan rekonsiliasi nasional; (5) terdapat kesamaan pendapat di antara para peserta JIM mengenai dua persoalan kunci untuk menyelesaikan masalah Kamboja, yakni penarikan mundur pasukan Vietnam dari Kamboja dan pencegahan terulangnya kembali pembantaian rakyat Kamboja oleh rezim Pol Pot, serta pemastian penghentian campur-tangan asing dan pengiriman senjata dari luar kepada pasukan-pasukan bersenjata Kamboja yang saling bertentangan; (6) para peserta JIM menganggap perlu kehadiran internasional untuk mengawasi proses tercapainya perdamaian di Kamboja; (7) semua peserta JIM mengakui bahwa masalah Kamboja itu kompleks, banyak dimensi dan seginya, oleh sebab itu memerlukan pembahasan lebih lanjut (*Merdeka*, 29 Juli 1988).

## Para Penulis

- **BANDORO, Bantarto,**  
Sarjana Hukum jurusan Hukum Internasional Publik, Universitas Indonesia, 1978; MA dalam Hubungan Internasional dari International University of Japan, Graduate School of International Relations, 1986; sejak 1980 menjadi anggota Departemen Hubungan Internasional (HI) CSIS, peneliti dan pengamat masalah Asia Timur, khususnya Jepang dan hubungannya dengan Amerika Serikat.
- **DIPOYUDO, Kirdi,**  
Gelar Doktor dari Universitas Urbaniana, Roma (1961). Spesialisasinya adalah filsafat sosial. Mulai tahun 1972 menjadi staf peneliti CSIS, anggota Departemen Hubungan Internasional CSIS, mengamati masalah-masalah internasional termasuk kawasan Afrika dan Timur Tengah serta masalah-masalah yang berhubungan dengan filsafat sosial. Editor *Analisa* (1976-1984), Editor *The Indonesian Quarterly* (1984-1988), Ketua Departemen Hubungan Internasional (1979-1983).
- **JOESOEF, Daoed,**  
Sarjana Ekonomi, Universitas Indonesia (1959). Certificat Doctorat de l'Université dari Faculté du Droit et des Sciences Économiques Université de Paris (1966) dan Diplôme d'Études Supérieures (1969). Doctorat d'État di Université Pluridisciplinaire de Paris I (Panthéon-Sorbonne), 1973. Pengamat masalah-masalah strategi, perdamaian, pendidikan dan kebudayaan. Sampai sekarang Ketua Dewan Direktur CSIS. Pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Pembangunan III (1978-1983) dan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (1983-1988).
- **RUKMO, Endi,**  
Sarjana Muda dari Akademi Hubungan Internasional (AHI), Jakarta, 1979 dan MA dalam Hubungan Internasional dari Australian National University (ANU), Canberra, Australia, 1982; sebagai staf peneliti CSIS, meneliti dan mengamati masalah Asia Timur khususnya Cina. Sebelumnya, Anggota Tim Summary (Ringkasan Peristiwa) CSIS selama tahun 1976-1979.